



**PEMERINTAH
KABUPATEN JOMBANG**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Jl. Presiden KH. Abdurahman Wahid No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmptsp.jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2023, ini dapat dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi tahun 2022 dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengukuran dan evaluasi kinerja instansi selama tahun 2023, yang memuat data kinerja yang akuntabel, meliputi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Disamping itu juga dilaporkan akuntabilitas keuangan berupa data alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu landasan yuridis formal dan instrumen untuk mengukur serta mengevaluasi pertanggungjawaban kinerja organisasi dan pelaksanaan tugas aparatur pemerintah pada berbagai level instansi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang selama Tahun 2023 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jombang, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**



Dra. WOR WINDARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3 Fungsi Strategis Perangkat Daerah	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis (Renstra)	9
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)	11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	29
3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	29
3.1.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua (2) Tahun Terakhir	33
3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah	41
3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level di Level Nasional/Internasional.....	44
3.1.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja.....	46
3.2 Realisasi Anggaran	51
3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	51
3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	54
3.2.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/ Anggaran.....	54
3.2.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia	57
3.2.2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	59

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	61
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	77
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023	
Lampiran 3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2023	
Lampiran 4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2023	
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2.1 Data SDM Menurut Golongan	5
Tabel 1.2.2 Data SDM Menurut Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2.3 Data SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3.1 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	8
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023	11
Tabel 2.2.1.1 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada Perubahan Renja PD Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang.....	13
Tabel 2.3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023	26
Tabel 3.1 Skala Capaian Kinerja	29
Tabel 3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 ...	30
Tabel 3.1.2 Nilai IPP Tahun 2023	32
Tabel 3.1.3 Nilia Evaluasi AKIP Tahun 2023	33
Tabel 3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir.....	34
Tabel 3.1.5 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah	41
Tabel 3.1.6 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional	44
Tabel 3.1.7 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi dan Nasional	45
Tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	51
Tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran.....	55
Tabel 3.2.3 Proyeksi Kebutuhan Pegawai	58
Tabel 3.2.4 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2023	59

BAB 1**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

emerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas dasar tekad dan semangat untuk mewujudkan akuntabel dan good governance itu maka beban tugas dan tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dirasakan semakin berat, karena aparatur daerah dituntut untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan hasil / manfaat kepada masyarakat. Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima.

Selanjutnya salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, karena merupakan salah satu wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan pada setiap akhir tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kinerja Instansi Pemerintah maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi, agar instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2023 pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang disertai dengan berbagai sumberdaya yang dipergunakan untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Dinas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang. Dan sebagai instansi yang bertugas mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal di Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 92 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan menyelenggarakan fungsi :

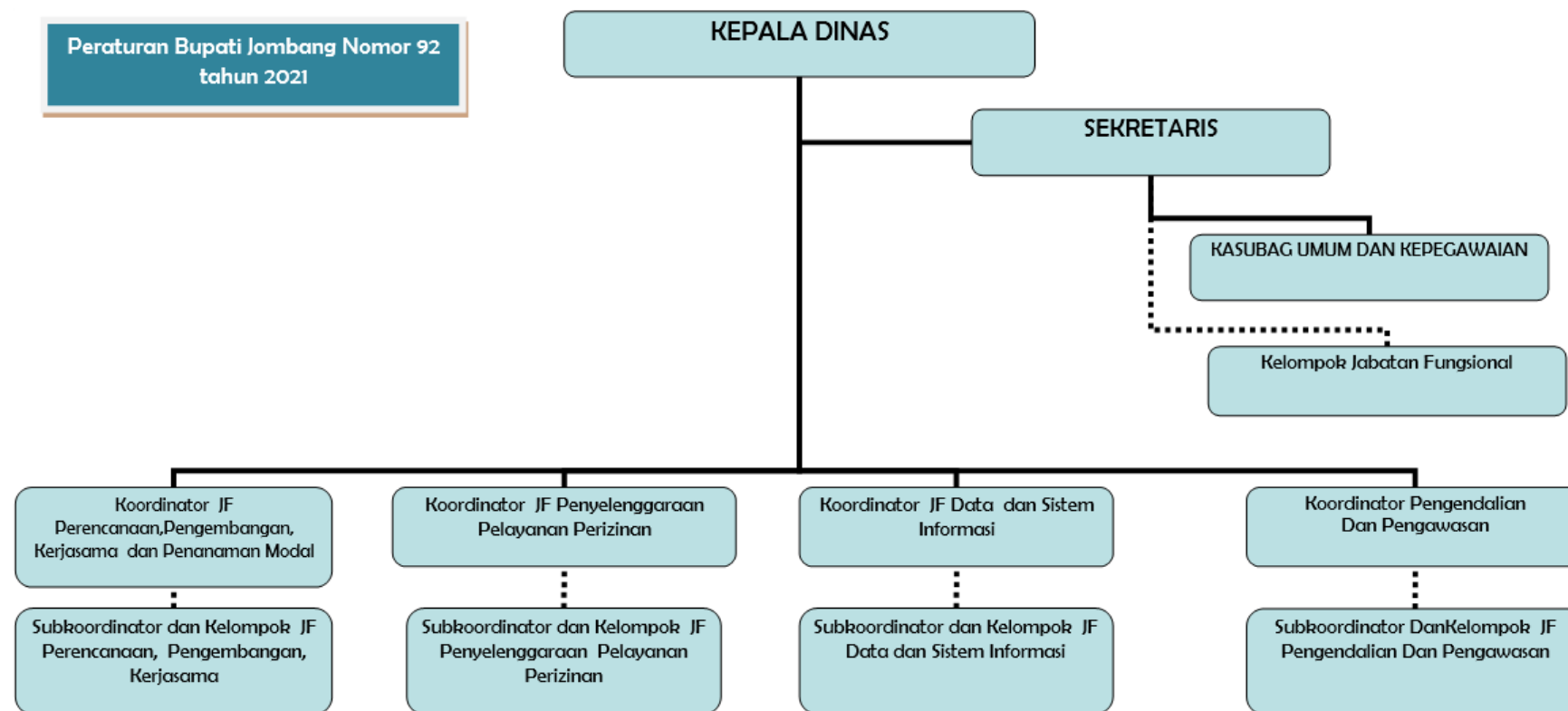
- Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, Berkoordinasi dengan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama, dan Promosi Penanaman Modal;
4. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.
5. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, berkoordinasi dengan:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
6. Koordinator Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan, berkoordinasi dengan:
5. Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengendalian dan Pengawasan;

*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang memiliki 43 (Empat Puluh Tiga) Sumber Daya Manusia, meliputi 30 (Tiga Puluh) Aparatur Sipil Negara, dan 13 (Tiga Belas) orang tenaga kontrak (Non ASN). Susunan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 1.2.1
Data Sumber Daya Manusia
Menurut Golongan

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
I	-
II	4 orang
III	20 orang
IV	6 orang
Non ASN	13 orang
Jumlah	43 orang

Tabel 1.2.2
Data Sumber Daya Manusia
Menurut Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	ASN	PEGAWAI HONORER	JUMLAH
Laki-Laki	17	8	25
Perempuan	13	5	18
Jumlah	30	13	43

Tabel 1.2.3
Data Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	ASN	PEGAWAI HONORER
1	S2	9	-
2	S1	16	8
3	D1-D3	2	-
4	SLTA	3	5
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
	JUMLAH	30	13

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jombang, memiliki peta proses bisnis utama yang merupakan penjelasan dari proses bisnis dari tiap bidang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan salah satu kegiatan pelayanan publik yang meliputi semua jenis perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati. Program peningkatan mutu pelayanan perizinan merupakan program yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Program ini memiliki keterkaitan proses dengan Pencabutan Izin, Rekomendasi Teknis, Regulasi Izin, dan Permohonan Izin. Hal tersebut dapat mempengaruhi program peningkatan mutu pelayanan perizinan. Rekomendasi teknis merupakan dasar pertimbangan penerbitan izin sehingga kualitas mutu pelayanan rekomendasi teknis akan mempengaruhi secara langsung Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan. Dalam rangka peningkatan realisasi investasi penanaman modal, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan memiliki keterkaitan proses dengan Program Pengendalian Dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan. Output perizinan pelaku usaha ditindak lanjuti oleh kegiatan pengendalian penanaman modal dalam bentuk laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara periodik triwulan. Diharapkan dari 2 (dua) program yang berkesinambungan ini dapat meningkatkan realisasi investasi penanaman modal. Dalam rangka pemenuhan data penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan prima, Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan memiliki keterkaitan dengan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Data perizinan yang terbit dapat menjadi data utama penanaman modal. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan perizinan yang prima dapat juga memanfaatkan teknologi sistem informasi yang dikembangkan dalam Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan prima berbasis teknologi system informasi dan keakuratan data penanaman modal. Program penunjang dalam Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan terkait dukungan perlengkapan, sumber daya manusia dan anggaran. Hal itu termasuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan Program Perencanaan Strategis Pelaporan Kinerja yang diampu oleh Sekretariat. Dukungan tersebut sangatlah diperlukan untuk implementasi kegiatan

penyelenggaraan pelayanan perizinan.

1.3 FUNGSI STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Aspek-aspek strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu:

- Peningkatan nilai investasi daerah;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan dan Penanaman Modal;

Identifikasi permasalahan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan tugas, pokok dan fungsi meliputi :

1. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal SOP dalam proses pelayanan penanaman modal dan sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan SDM penanaman modal.
2. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap perijinan secara online.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan dan kebijakan penanaman modal.
4. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah.
5. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang.
6. Pertumbuhan investasi yang telah dicapai belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

7. Belum terbentuknya regulasi tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investasi.
8. Belum optimalnya pelayanan publik yang dapat menunjang perkembangan iklim usaha di Kabupaten Jombang.
9. Waktu penerbitan rekomendasi dari OPD Teknis yang masih belum maksimal/sesuai SOP.
10. Implementasi Konsep Percepatan Berusaha belum sepenuhnya maksimal (terkait penempatan OPD Teknis di DPMPTSP).

Tabel 1.3.1

**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya nilai realisasi investasi	Kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi	Belum adanya penerapan regulasi terkait penanaman modal
		Promosi investasi belum optimal	Kegiatan promosi investasi tidak bisa dilaksanakan akibat imbas apndemi
			Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi unggulan daerah
			Masih belum luasnya cakupan investasi yang ada di Kabupaten Jombang
			Masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait pelaporan LKPM
2	Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat belum optimal	Masih ada anggapan pengurusan izin sulit	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kemudahan mengurus izin secara online
		Belum optimalnya sistem teknologi informasi	Kurang optimalnya sistem penunjang teknologi informasi untuk pelayanan perizinan dan non perizinan
			Belum optimalnya koordinasi lintas sektor

BAB 2**PERENCANAAN KINERJA****2.1 PERENCANAAN STRATEGIS**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Visi dan Misi, diterjemahkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara sistematis, sinergi dan terpadu dengan lebih teknis, meliputi : Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. VISI

Visi Kepala Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 adalah :

“Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing”

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023 sebagai berikut :

- (1) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional
- (2) Mewujudkan Masyarakat Jombang Yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya
- (3) Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri

3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas Layanan Publik di bidang Perizinan dan PM
- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- Meningkatkan Investasi Daerah

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang yang ingin dicapai guna mendukung tema pembangunan dan prioritas pembangunan antara lain:

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

Indikator Sasaran :

- ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan
- ✓ Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan

- Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah;

Indikator Sasaran :

- ✓ Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah

- Meningkatnya Investasi Daerah;

Indikator Sasaran :

- ✓ Nilai Investasi Tahun n

Adapun dalam pencapaian visi dan misi yang mengacu pada misi ke-1 dan 3 RPJMD Kabupaten Jombang terdapat faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi tercapainya visi dan misi itu sendiri diantara lain :

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi antara lain :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pengurusan izin.
2. Kurangnya koordinasi serta sosialisasi antara DPM PTSP dalam hal ini sebagai pemerintah dan pelaku usaha di daerah serta investor.
3. Proses perizinan melebihi dari SOP yang diterapkan dikarenakan koordinasi lintas dengan SKPD Teknis.
4. Belum optimalnya SOP dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal.
5. Belum terdapatnya kepastian dalam hal perizinan dikarenakan perubahan Perundang-undangan.
6. Kurang terintergerasinya penanaman modal dari investor terhadap UKM di daerah sehingga kurang berkembangnya Pengembangan Potensi Daerah.

b. Faktor Pendorong

Faktor pendorong dari fungsi DPM PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang yakni :

1. Adanya kegiatan administrasi mengenai Tata Kelola Perizinan dan Penanaman Modal di Kabupaten Jombang.
2. Adanya OSS (Online Single Submission) dalam pengurusan perizinan secara online
3. Adanya kegiatan menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Jombang.
4. Adanya pengaturan kebijakan tentang perizinan dan penanaman Modal di Kabupaten Jombang.
5. Memberikan legalitas obyek perizinan di Kabupaten Jombang.
6. Adanya kenyamanan investasi di Kabupaten Jombang.
7. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui penetapan kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2023 mengacu pada RKT Tahun 2023. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1
PERJANJIAN KINERJA (PK) PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun n	1.400 Milyar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Layanan Perizinan	89,85
		- Indeks Pelayanan Publik (IPPdi bidang PM dan Perizinan	4,15
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81)

PROGRAM		ANGGARAN	
1.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	245.882.500,-
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	1.065.879.550,-
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	326.253.150,-
4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	338.619.000,-
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Rp.	457.539.500,-
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.368.065.621,-
JUMLAH		Rp.	9.802.239.321,-

2.2.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 di atas, untuk mendukung sasaran strategis Perangkat Daerah didukung oleh 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan. Dengan total pagu anggaran Rp. 9.802.239.321 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), yang sumber pendanaan berasal dari APBD dan DAK Non Fisik.

Sumber Pendanaan dari P-APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 9.457.993.321,- sedangkan yang berasal dari DAK Non Fisik Sebesar Rp. 344.300.000,-.

Untuk program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 antara lain disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.1
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)			Catatan			
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023			Perubahan Renja 2023		Target Renja PD						
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.							
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN YANG SESUAI DENGAN STANDART PELAYANAN	172.94	%	532.522.067	90.94	%	231.268.667	82	%	301.253.400	97,58	%	76.603.034	82	%	326.253.150	0	%	24.999.750	Penambahan untuk kegiatan pelayanan perizinan di luar kantor sehari jadi tanpa antri (perialku santri) di Kecamatan		
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelayanan perizinan yang diterbitkan	180.23	%	532.522.067	91.23	%	231.268.667	89	%	301.253.400	77,50	%	76.603.034	89	%	326.253.150	0	%	24.999.750			
		Persentase pengaduan masyarakat yg diselesaikan	100	%		100	%		100	%		100	%		100	%							
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.000	pelaku usaha	482.829.167		pelaku usaha	228.179.767	6000	pelaku usaha	254.649.400	9988	pelaku usaha	74.023.034	11000	pelaku usaha	279.649.150	5000	pelaku usaha	24.999.750			
		Jumlah pelaksanaan bulaga				6	Kali																
		Jumlah perizinan berusaha yang diterbitkan				10.060	izin																

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)				Catatan		
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023					Perubahan Renja 2023		Target Renja PD				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12={10-6}	13={11-7}	14
		Jumlah perizinan non berusaha yang diterbitkan				2897	izin																
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	800	pelaku usaha	28.089.100		pelaku usaha	800.000	800	pelaku usaha	27.289.100	400	pelaku usaha	-	800	pelaku usaha	27.289.100	0	pelaku usaha	-			
		Persentase Pemenuhan komitmen perizinan berusaha yang diterbitkan				67,53	%																
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Non Perizinan	16	orang	21.603.800		orang	2.288.900	16	orang	19.314.900	14	orang	2.580.000	16	orang	19.314.900	0	orang	-			
		Prosentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti				100	%																
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA SISTEM INFORMASI YANG PUAS DENGAN PELAYANAN PERIZINAN	50	%	501.866.080	27	%	198.247.080	23	%	303.619.000	0	%	52.224.750	23	%	338.619.000	0	%	35.000.000			
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna data dan informasi PM dan perizinan	9541	pengguna	501.866.080	5541	pengguna	198.247.080	4000	pengguna	303.619.000	4261	pengguna	52.224.750	5000	pengguna	338.619.000	1000	pengguna	35.000.000			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada			Bertambah/(Berkurang)			Catatan		
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023			Perubahan Renja 2023			Target Renja PD					
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.				
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	8	Lap ora n	501.866.080	4	Lapor an	198.247.080	8	Lap ora n	303.619.000	4	Lap ora n	52.224.750	8	Lap ora n	338.619.000	0	Lap ora n	35.000.000	Penambahan untuk belanja Upgrade aplikasi Geograp hic Informat ion System (GIS)		
		Jumlah Frekuensi pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan PM dan Perizinan				4	Kali																
		Jumlah Dokumen standar pelayanan perizinan				4	doku men																
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	JUMLAH RUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN IKLIM PM YANG DIHASILKAN	2	Keb ijak an	584.833.329	1	Kebij akan	243.950.829	1	Ke bij aka n	340.882.500	0	Ke bij aka n	6.464.500	1	Ke bij aka n	245.882.500	0	Ke bij aka n	(95.000.000)	Pengura ngan anggran pada Pelaksan aan penyusu nan IPRO yang ditamba hkan/ digeser		
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Persentase Data Potensi dan Peluang Investasi yang dimanfaatkan	200	%	584.833.329	100	%	243.950.829	100	%	340.882.500	0	%	6.464.500	100	%	245.882.500	0	%	(95.000.000)			
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan peluang investasi yang disusun	6	Dok um en	584.833.329	3	Doku men	243.950.829	3	Do ku me n	340.882.500	0	Do ku me n	6.464.500	3	Do ku me n	245.882.500	0	Do ku me n	(95.000.000)			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)				Catatan				
									Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II 2023				Perubahan Renja 2023		Target Renja PD						
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
																							untuk pelaksan aan GPJ dalam rangka hari Jadi Kabupat en Jomban g
		Jumlah Dokumen Peta Potensi dan peluang investasi yang disusun				3	Doku men																
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE TINDAKLANJUT PROMOSI PENANAMAN MODAL	200	%	1.120.858.908	100	%	228.479.390	100	%	892.379.550	-	%	51.462.700	100	%	1.065.879.550	0	%	173.500.000			
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Calon investor yang berminat	200	%	1.120.858.908	100	%	228.479.390	100	%	892.379.550	-	%	51.462.700	100	%	1.065.879.550	0	%	173.500.000			
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5	dokumen	1.120.858.908	0	dokumen	228.479.390	5	dokumen	892.379.550	1	dokumen	51.462.700	5	dokumen	1.065.879.550	0	dokumen	173.500.000	Penambahan untuk kegiatan GPJ dalam Rangka memper ingati Hari Jadi Kabupat en Jomban g		
		Jumlah Promosi Potensi Unggulan Daerah yang diikuti				0	Kali																
		Jumlah pelaku usaha yg terfasilitasi promosi				0	pelaku usaha																
		Jumlah peserta Temu Usaha yang berpotensi menjadi calon investor				20	orang																

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023				Usulan perubahan target dan anggaran pada			Bertambah/(Berkurang)			Catatan				
									Target Renja 2023		Realisasi Triwulan II 2023					Perubahan Renja 2023		Target Renja PD					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA TERHADAP PERATURAN PENANAMAN MODAL	198.53	%	830.788.500	123.53	%	408.249.000	75	%	422.539.500	47,06	%	134.486.000	75	%	457.539.500	0	%	35.000.000			
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang patuh sesuai dengan ketentuan Penanaman Modal	190	Perusahaan	830.788.500	105	Perusahaan	408.249.000	85	Perusahaan	422.539.500	40	Perusahaan	134.486.000	85	Perusahaan	457.539.500	0	Perusahaan	35.000.000			
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	190	pelaku usaha	26.976.000	105	pelaku usaha	2.138.000	85	pelaku usaha	24.838.000	40	pelaku usaha	8.403.500	85	pelaku usaha	24.838.000	0	pelaku usaha	-			
		Jumlah Perusahaan yang melaporkan LKPM				105	Perusahaan																
		Jumlah Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal				19	obyek pengawasan																
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	230	pelaku usaha	93.984.500	140	pelaku usaha	40.583.000	90	pelaku usaha	53.401.500	20	pelaku usaha	-	90	pelaku usaha	88.401.500	0	pelaku usaha	35.000.000	Penambahan pelaksanaan kegiatan bimtek LKPM		

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)				Catatan		
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023					Perubahan Renja 2023		Target Renja PD				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
																							dan sosialisasi OSS RBA bagi pelaku usaha
		Persentase pendampingan perusahaan yang ditindaklanjuti				100	%																
		Jumlah peserta bimtek LKPM				140	orang																
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	32	Kegiatan Usaha	709.828.000	16	Kegiatan Usaha	365.528.000	16	Kegiatan Usaha	344.300.000	6	Kegiatan Usaha	126.082.500	16	Kegiatan Usaha	344.300.000	0	Kegiatan Usaha	-			
		Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal				16	laporan																
		Jumlah Bimtek / Sosialisasi Kemudahan Berusaha				480	orang																
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA APARATUR	200	%	12.925.625.745	100	%	5.632.320.297	100	%	7.302.605.409	100	%	3.185.831.465	100	%	7.368.065.621	0	%	65.460.212			
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	200	%	85.238.000	100	%	8.582.500	100	%	76.655.500	100	%	18.627.700	100	%	76.655.250	0	%	(250)			
2.18.01.2.01.010	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	30.676.500		Dokumen	1.399.000	3	Dokumen	29.277.500	2	Dokumen	7.583.500	3	Dokumen	29.277.500	0	Dokumen	-			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada			Bertambah/(Berkurang)				Catatan			
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023						Perubahan Renja 2023			Target Renja PD				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)		13=(11-7)		14
		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun				10	Doku men																		
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31	Dok um en	54.561.500	10	Doku men	7.183.500	5	Do ku me n	47.378.000	3	Do ku me n	11.044.200	5	Do ku me n	47.377.750	0	Do ku me n	(250)					
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun				26	Doku men																		
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	200	%	9.522.412.334	16	%	4.629.618.898	100	%	4.892.793.409	100	%	2.243.723.506	100	%	4.884.553.409	0	%	(8.240.000)					
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	200	%		100	%		100	%		100	%		0	%									
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Peg aw ai	9.165.808.334		Pega wai	4.461.812.898	31	Peg aw ai	4.703.995.409	31	Peg aw ai	2.157.628.506	31	Peg aw ai	4.703.995.409	0	Peg aw ai	-					
		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup DPMP TSP yang di fasilitasi				14	bulan																		
2.18.01.2.02.07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	16	lap ora n	356.604.000		lapor an	167.806.000	12	lap ora n	188.798.000	4	lap ora n	86.095.000	12	lap ora n	180.558.000	0	lap ora n	(8.240.000)					
		Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD				12	lapor an																		



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)				Catatan		
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023					Perubahan Renja 2023		Target Renja PD				
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahunSKPD yang tersusun				1	lapor an	-	1	lap ora n	-	1	lap ora n	-	1	lap ora n	-		lap ora n				
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	200	%	922.389.224	100	%	332.596.624	100	%	589.792.600	50	%	123.873.812	100	%	647.317.650	0	%	57.525.050			
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28	jeni s	15.893.898		jenis	7.859.898	14	jeni s	8.034.000	6	jeni s	3.930.000	14	jeni s	8.034.000	0	jeni s	-			
		Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi				14	jenis																
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	140	jeni s	201.610.700		jenis	77.582.700	70	jeni s	124.028.000	35	jeni s	34.861.000	70	jeni s	124.678.800	0	jeni s	650.800			
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi				70	jenis																
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	jeni s	6.953.100		jenis	3.457.100	6	jeni s	3.496.000	6	jeni s	969.000	6	jeni s	3.496.000	0	jeni s	0			
		Jumlah peralatan rumah tangga PD yang terfasilitasi				6	jenis																
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	pak et	282.380.506		paket	71.437.006	3	pak et	210.943.500	3	pak et	43.523.350	3	pak et	223.043.500	0	pak et	12.100.000	u/ BBM perjalanan dinas dalam kota		
		Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi				52	Pega wai																
		Jumlah Penyediaan BBM yang terfasilitasi				1934	liter																

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)				Catatan		
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023					Perubahan Renja 2023		Target Renja PD				
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.			
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	pak et	158.694.850	0	paket	60.811.750	2	pak et	97.883.100	2	pak et	14.398.450	2	pak et	95.081.350	0	pak et	(2.801.750)			
		Jumlah pemenuhan barang cetak				7	jenis																
		Jumlah pemenuhan barang penggandaan				85.352	lemb ar																
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dok um en	59.825.000		Doku men	31.725.000	36	Do ku me n	28.100.000	18	Do ku me n	11.614.000	36	Do ku me n	43.100.000	0	Do ku me n	15.000.000			
		Jumlah pemenuhan bahan bacaan				3	jenis																
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	lap ora n	197.031.170		lapor an	79.723.170	35	lap ora n	117.308.000	22	lap ora n	14.578.012	35	lap ora n	149.884.000	0	lap ora n	32.576.000	u/ perjalanan dinas dalam rangka penilaia n PTSP, koordin as ke BKPM		
		Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				35	kali																
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100	%	589.910.004	100	%	62.100.000	100	%	527.810.000	73,91	%	484.040.000	100	%	541.616.000	0	%	13.806.000	u/ mesin finger print, pengada an kendaraan dinas jabatan 1 unit, pengada		
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana gedung dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang di sediakan	32	Uni t	589.910.004	9	Unit	62.100.000	23	Uni t	527.810.000	17	Uni t	484.040.000	30	Uni t	541.616.000	7	Uni t	13.806.000			

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada			Bertambah/(Berkurang)			Catatan		
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023			Perubahan Renja 2023			Target Renja PD					
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
																							an kendaraan dinas operasional R2 = 5 unit
		Jumlah pengadaan sarana gedung kantor				7	Unit																
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah	200	%	956.371.675	100	%	299.137.675	100	%	657.234.000	66,67	%	211.705.647	100	%	608.954.000	0	%	(48.280.000)		u/ jasa tenaga keamanan 2 orang x 3 bulan	
2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	laporan	3.600.000		laporan	1.800.000	12	laporan	1.800.000	6	laporan	1.000.000	12	laporan	1.800.000	0	laporan	-			
		Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12	bulan																
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	laporan	393.455.525		laporan	134.495.525	12	laporan	258.960.000	6	laporan	64.705.960	12	laporan	177.480.000	0	laporan	(81.480.000)			
		Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi				12	bulan																
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	20	laporan	559.316.150	12	laporan	162.842.150	8	laporan	396.474.000	8	laporan	145.999.687	8	laporan	429.674.000	0	laporan	33.200.000			
		Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum				13	jenis																
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	200	%	849.304.508	100	%	290.984.600	100	%	558.319.900	50	%	103.860.800	100	%	608.969.312	0	%	50.649.412			

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/S ub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)			Catatan			
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023			Perubahan Renja 2023		Target Renja PD						
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.							
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit	55.429.500		Unit	14.319.500	1	Unit	41.110.000	1	Unit	6.746.000	1	Unit	41.110.000	0	Unit	-			
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				1	Unit																
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan pajaknya				1	Unit																
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit	190.322.776		Unit	78.896.100	24	Unit	111.426.674	12	Unit	20.664.800	24	Unit	121.426.674	0	Unit	10.000.000			
		Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara				24	Unit																
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya				24	Unit																
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	gedung	398.673.232		gedung	89.490.000	2	gedung	309.183.226	1	gedung	27.920.000	2	gedung	309.183.226	0	gedung	-	u/ rehab gedung belakan g		
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya				2	gedung																
		Perangkat Daerah yang dipelihara																					

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (Output)	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)			Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan s/d tahun 2022			Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan/sub kegiatan PD pada Renja 2023						Usulan perubahan target dan anggaran pada		Bertambah/(Berkurang)			Catatan			
									Target Renja 2023			Realisasi Triwulan II 2023			Perubahan Renja 2023		Target Renja PD						
			K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.							
1	2	3	4			5			6		7		8		9		10		11		12=(10-6)	13=(11-7)	14
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	196	Unit	204.879.000		Unit	108.279.000	106	Unit	96.600.000	52	Unit	48.530.000	106	Unit	137.249.412	0	Unit	40.649.412			u/ kekurangan pemeliharaan sarana dan prasarana
		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara				84	Unit																
											9.563.279.359			3.507.072.449			9.802.239.321			238.959.962			

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan seleksi dari indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan oleh organisasi. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun n	Nilai realisasi investasi tahun (n) (Nilai realisasi investasi berasal dari data pada OSS dan dari laporan LKPM pada tahun n)	Laporan Data Realisasi Investasi Daerah	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	Nilai IKM layanan perizinan tahun (n) (Nilai IKM layanan perizinan didapatkan dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP. Nilai IKM ini berasal dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat atas 9 unsur yakni : - Persyaratan - Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Waktu Penyelesaian - Biaya/Tarif - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan - Kompetensi Pelaksana - Perilaku Pelaksana	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan - Sarana dan prasarana		
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan tahun (n) (Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan didapat dengan menghitung nilai indeks yang merupakan perkalian antara nilai aspek dengan bobot aspek. Nilai IPP ini terdiri dari 6 aspek yakni Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.	Laporan Hasil IPP bidang PM dan Perizinan	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun (n) Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah merupakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD yang terdiri dari 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.	Laporan Hasil Nilai Evaluasi SAKIP	DPM PTSP KABUPATEN JOMBANG

BAB 3**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah bagian dari organisasi Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola urusan perizinan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement).

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut ;

Tabel 3.1
Skala Capaian Kinerja

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	>110%-120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90%-110%	Baik (Berhasil)
3	>70%-80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50%-70%	Kurang
5	0%-50%	Sangat Kurang

Pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggungjawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, yang meliputi 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
2. Meningkatnya Daya Tarik Investasi
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

3.1.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kinerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan. Pengukuran kinerja sasaran terhadap target kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun n	1.400 (dalam Milyar Rp)	1.715.913.003.483	122,57
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim PM Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 kebijakan	100
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	117,65%	156,86
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	89,85	89,94	100,10
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,15	4,43	106,75

SASARAN STRATEGIS-PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82%	92,32%	112,58
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	23,71%	103,09
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81)	81,38	100,47
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100

Sasaran 1 :**Meningkatnya Daya Tarik Investasi**

- Pada tahun 2023 untuk sasaran Meningkatkan Daya Tarik Investasi dengan indikator kinerja Nilai Investasi Tahun n ditargetkan sebesar Rp 1,4 T dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.715.913.003.483,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 295.058.878.540,- dan PMDN sebesar Rp. 1.420.854.124.943,-. Nilai realisasi investasi daerah tersebut, melebihi target sehingga capaian kinerja sebesar 122,57% dengan kategori *Istimewa*.

Program :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan sebanyak 1 kebijakan, dapat terealisasi 1 kebijakan sehingga tercapai sebesar 100% dengan kategori *Baik*.
- Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal 100%, dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100% dengan kategori *Baik*.
- Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 75% dapat terealisasi 117,65% tercapai sebesar 156,86% dengan kategori *Istimewa*.

*Sasaran 2 :**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan*

- Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 89,85. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat terealisasi sebesar 89,94 yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat (SKM) sebanyak sebanyak 893 responden, diantaranya terdiri dari 577 Fasilitas Perizinan Berusaha, 245 Fasilitas Perizinan Non Berusaha dan 71 Pelayanan Kesekretariatan. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 100,10%, dengan kategori *Baik*.
- Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 4,15. Nilai IPP pada tahun 2023 terealisasi sebesar 4,43 sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 106,75% dengan kategori *Baik*.
- Nilai IPP di bidang PM dan Perizinan didapat dengan menghitung nilai indeks yang merupakan perkalian antara nilai aspek dengan bobot aspek. Nilai IPP ini terdiri dari 6 aspek yang disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3.1.2
Nilai IPP Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	ASPEK	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	4,86
2.	Aspek Profesionalisme SDM	18%	3,4
3.	Aspek Sarana Dan Prasarana	15%	4,74
4.	Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik	15%	4,4
5.	Konsultasi Dan Pengaduan	15%	4,75
6.	Inovasi	7%	4
	INDEK IPP		4,43 (Pelayanan Prima)

Program :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 82% dapat terealisasi 92,32% sehingga capaian kinerja sebesar 112,58% *dengan kategori Istimewa*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 23,71% sehingga tercapai sebesar 103,09% *dengan kategori Baik*.

Sasaran 3 :**Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah**

- Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 81 (A). Realisasi nilai evaluasi SAKIP tahun 2023 adalah 81,38 (A) sehingga capaian kinerja sebesar 100,47% *dengan kategori Baik*.
- Nilai evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023 merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26,41
2.	Pengukuran Kinerja	30%	27,92
3.	Pelaporan Kinerja	15%	8,18
4.	Evaluasi Kinerja	25%	18,87
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	81,38

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100% *dengan kategori Baik*.

3.1.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Dua (2) Tahun Terakhir

Berikut realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu 2022 serta beberapa tahun sebelumnya 2021, ditunjukkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.1.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi Tahun n (PMA dan PMDN)	1250 (dalam Milyar Rp)	1.281.861.308.019	102,55	1.800 (dalam Milyar Rp)	1.633.411.613.631	90,75	1.400 (dalam Milyar Rp)	1.715.913.003.483	122,57
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim PM Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 kebijakan	100	1 Kebijakan	1 kebijakan	100	1 Kebijakan	1 kebijakan	100
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	70%	100%	142,9%	75%	123,53%	164,71	75%	117,65%	156,86
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	86,15	88,14	102,31	87,75	85,11	96,99	89,85	89,94	100,10
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,07	3,58	87,96	4,10	4,61	112,44	4,15	4,43	106,75
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	78%	79,45%	101,9	80%	90,94%	113,67	82%	92,32%	112,58



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN STRATEGIS - PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	22%	80%	363,6	23%	27%	116%	23%	23,71%	103,09
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80.15	80.19	100.05	81	80,39	99,24	A (81)	81,38	100,47
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100



Sasaran 1 :***Meningkatnya Investasi Daerah***

- Pada tahun 2023 untuk sasaran Meningkatkan Daya Tarik Investasi dengan indikator kinerja Nilai Investasi Tahun n ditargetkan sebesar Rp 1,4 T (PMA dan PMDN). Target ini lebih rendah dari tahun 2022 yaitu Rp. 1,8 T (PMA, PMDN dan IUMK) dikarenakan nilai realisasi investasi yang dirilis secara Nasional oleh Kementerian Investasi RI/BKPM yaitu berasal dari PMA dan PMDN. Sehingga di tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1,4T untuk PMA dan PMDN, dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.715.913.003.483,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 295.058.878.540,- dan PMDN sebesar Rp. 1.420.854.124.943,-. Dari nilai realisasi investasi daerah tersebut, melebihi target sehingga capaian kinerja sasaran sebesar 122,57% dengan kategori *Istimewa*.
- Di tahun 2022 untuk sasaran Meningkatkan Investasi Daerah dengan indicator kinerja Nilai Investasi Tahun n ditargetkan sebesar Rp 1,8 T (PMA, PMDN dan IUMK), dan terealisasi sebesar Rp. 2.353.636.647.045,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 772.681.979.757,-, PMDN sebesar Rp. 860.729.633.874,- dan IUMK sebesar Rp 720.225.033.414,- Sehingga untuk Realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2022 sebesar Rp 1.633.411.613.631,-. Dari nilai realisasi investasi tersebut, di tahun 2022 capaian kinerja sasaran sebesar 90,75% dengan kategori *Baik*.
- Sedangkan pada tahun 2021 target nilai realisasi investasi daerah sebesar Rp 1,250 T (PMA, PMDN dan IUMK),- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.587.162.318.948,-. Yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 120.510.250.808,-, PMDN sebesar Rp. 1.161.351.057.211,- dan IUMK sebesar Rp. 305.301.010.929,-. Sehingga untuk Realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.281.861.308.019,- Dari nilai realisasi investasi tersebut, di tahun 2021 capaian kinerja sasaran sebesar 102,55% dengan kategori *Baik*.
- Berdasarkan keterangan di atas bila dibandingkan pada tahun 2022, maka nilai realisasi investasi untuk tahun 2023 naik sebesar 5,05%, dengan kenaikan investasi sebesar Rp. 82.501.389.852,-. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021, perkembangan realisasi nilai investasi untuk tahun 2022 naik sebesar 27,42%, dengan kenaikan investasi sebesar Rp. 351.550.305.612,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN) mengalami fluktuatif dikarenakan kondisi perekonomian pada umumnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**Program :**

- Pada tahun 2023 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan sebanyak 1 kebijakan, dapat terealisasi 1 kebijakan dengan capaian 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 presentase capaian kinerja dengan target sebanyak 1 kebijakan, juga terealisasi 1 kebijakan (peta potensi peluang investasi daerah Kabupaten Jombang) dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan setiap tahunnya dapat mempertahankan capaian kinerjanya 100% *dengan kategori Baik* dan mencapai target yang ditentukan yaitu dokumen peta potensi peluang investasi di tahun 2022 dan Tersusun IPRO 3 Sektor (Ternak Sapi di Desa Jenis Gelaran Bareng) di tahun 2023.
- Pada tahun 2023 Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal 100%, dapat terealisasi 100%. Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja dengan target 100%, dengan capaian 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan pada tahun 2022 telah dilaksanakan tindak lanjut dari 20 peserta bisnis gathering yang mengisi form kepeminatan. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2022-2023 tercapai 100 % *dengan kategori Baik*.
- Pada tahun 2023 Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 75% dapat terealisasi 117,65% dengan capaian 156,86%. Dibandingkan dengan tahun 2022 target kinerja dengan target 75%, realisasi kinerja 123,53% sehingga capaian kinerjanya 164,71%.
- Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan yaitu tahun 2022 terdapat 105 perusahaan yang telah melaporkan LKPM dari total target 85 perusahaan. Sedangkan Terdapat 100 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal dari tahun 2022 dengan capaian 164,71% dan 2023 dengan capaian 156,86% mengalami kenaikan dengan predikat *istimewa*.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***Sasaran 2 :******Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan***

- Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 89,85. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat terealisasi sebesar 89,94 yang diperoleh dari 893 responden tahun 2023, diantaranya terdiri dari 577 Fasilitas Perizinan Berusaha, 245 Fasilitas Perizinan Non Berusaha dan 71 Pelayanan Kesekretariatan. Sehingga untuk capaian kinerjanya Sasaran tercapai sebesar 100,10 %, dengan kategori *Baik*. Sedangkan untuk Nilai IPP ditetapkan target sebesar 4,15 dan terealisasi sebesar 4,43 sehingga capaian kinerja sasaran untuk IPP tahun 2023 sebesar 106,75% dengan kategori *Baik*.
- Untuk tahun 2022 nilai SKM ditetapkan target sebesar 87,75. dapat terealisasi sebesar 85,11. Yang diperoleh dari jumlah responden sebanyak 397 responden/pemohon yang sudah terlayani. Sehingga untuk capaian sasaran kinerjanya tercapai sebesar 96,99 %, dengan kategori *Baik*. Sedangkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 4,10. Nilai IPP ini dapat terealisasi sebesar 4,61 dengan kategori *Pelayanan Prima*. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 112,44 %, dengan kategori *Istimewa*.
- Di tahun 2021 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 86,15 indeks. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2021 sebesar 88,14 indeks yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat (SKM) dari 363 responden / pemohon yang sudah terlayani. Sehingga untuk capaian kinerja sasaran tercapai sebesar 102,31 %, dengan kategori *Baik*. Sedangkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 4,07. Nilai IPP ini dapat terealisasi sebesar 3,58 dengan kategori *Pelayanan Prima*. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 87,96 %, dengan kategori *Baik*.
- Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa untuk nilai realisasi IKM pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun tahun 2022 sebesar 85,11 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai sebesar 88,14 mengalami penurunan sebesar 3,03 point. Sedangkan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 89,94 mengalami kenaikan sebesar 4,83 point atau sebesar 5,67% bila dibandingkan tahun 2022. Sedangkan untuk nilai realisasi IPP pada tahun 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sebesar 4,61 dibanding dengan tahun 2021 sebesar 3,58 mengalami kenaikan sebesar 1,03 point atau sebesar 28,77%. Sedangkan ditahun 2023 nilai IPP sebesar 4,43 mengalami penurunan sebesar 0,18 point atau sebesar 3,90% dari tahun 2022, namun masih dalam kategori *Pelayanan Prima* dan capaian kinerja sasaran kategori *Baik*. Hal ini dikarenakan Komitmen tinggi aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk selalu melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan prima/ service excellence kepada masyarakat, dukungan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta sarana/prasarana dan peralatan yang memadai.

Program

- Pada Tahun 2023 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 82% dapat terealisasi 92,32% sehingga capaian kinerja sebesar 112,58%, Pada tahun 2022 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 80% dapat terealisasi 90,94% sehingga capaian kinerja sebesar 113,67%. Sedangkan pada tahun 2021 Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 78% dapat terealisasi 79,45% sehingga capaian kinerja sebesar 101,9%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan bisa mencapai indikator kinerjanya dengan target yang ditentukan pada 2021 yaitu dari total izin terbit (berusaha dan non berusaha) sejumlah 7.104 izin, yang terbit tepat waktu adalah 5.644 izin. Pada tahun 2022 dari jumlah izin yang terbit sejumlah 12.957 izin, 11.783 izin terbit sesuai standart pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan dari tahun 2021 dengan capaian 101,9% dan 2022 dengan capaian 113,67% mengalami kenaikan *dengan predikat istimewa*. Dan tahun 2023 dari jumlah izin yang terbit sejumlah 21.601 izin, 23.399 izin terbit sesuai standart pelayanan dengan capaian 112,58% mengalami penurunan 1,09%.
- Pada tahun 2023 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 23,71%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sehingga tercapai sebesar 103,09%. Pada tahun 2022 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% dapat terealisasi 27% sehingga tercapai sebesar 116%. Sedangkan tahun 2021 Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 22% dapat terealisasi 80% sehingga capaiannya sebesar 363,6%. Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan Pada tahun 2023 pengguna sistem informasi yang puas sebesar 6.855 pengguna. Pada tahun 2022 jumlah pengguna yang puas adalah 5.541 pengguna, sehingga terdapat peningkatan sebesar 23,71 %. Pada tahun 2022 jumlah pengguna yang puas adalah 5.541 pengguna sedangkan Pada tahun 2021, pengguna sistem informasi sejumlah 5.465 pengguna (478 sirindunona + 4.987 web perizinan), dan dari jumlah tersebut sebesar 4.372 pengguna sistem puas dengan pelayanan perizinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari 2021 mengalami penurunan dikarenakan angka di 2021 digunakan sebagai base data, dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru sesuai review Sakip Inspektorat.

Sasaran 3***Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah***

- Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator nilai evaluasi AKIP pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80,15 dan terealisasi sebesar 80,19 dengan kategori *(A) Memuaskan*, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,05% atau kategori Baik. Di tahun 2022 dan 2023 ditetapkan target sebesar 81. Realisasi di tahun 2022 nilai evaluasi AKIP sebesar 80,39 dengan kategori *(A) Memuaskan*, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,25%, atau kategori Baik. Dan realisasi tahun 2023 sebesar 81,38 dengan kategori *(A) Memuaskan*, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,47% atau kategori Baik. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui nilai evaluasi AKIP di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari tahun 2021. Sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,23% dari tahun 2022.
- Dari pencapaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SAKIP di perangkat daerah dan selalu melakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan serta evaluasi untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Program

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota pada tahun 2023 dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Pada tahun 2021 target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja tahun 2021-2023 tercapai 100% *dengan kategori baik*.

3.1.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Berikut realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan target RPJMD dalam dokumen Perubahan Renstra 2018-2023, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.5
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi daerah (PMA dan PMDN)	1.400 (dalam Milyar Rp)	1.715.913.003.483	22,57%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 kebijakan	-
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	100%	-
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	117,65%	56,87%
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	89,85	89,94	0,10%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,15	4,43	6,75%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82%	92,32%	12,59%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	23,71%	3,09%
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81	81,38	0,47%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	-

Sasaran 1 :***Meningkatnya Investasi Daerah***

- Pada tahun 2023 untuk sasaran meningkatnya investasi daerah dengan indikator nilai realisasi investasi terealisasi sebesar Rp 1.715.913.003.483,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 295.058.878.540,- dan PMDN sebesar Rp. 1.420.854.124.943,-. Target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar Rp 1.400.000.000.000,- Nilai realisasi investasi daerah tersebut, melebihi target dengan capaian kinerja sasaran sebesar 122,57%. Sehingga tingkat kemajuan untuk nilai realisasi investasi pada periode akhir Renstra tahun 2023 sebesar 22,57%.

Program :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan indikator Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim PM Yang Dihasilkan pada tahun 2023 terealisasi 1 kebijakan, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 1 kebijakan. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dan terealisasi sebesar 100%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program Promosi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal pada tahun 2023 terealisasi 100%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dan terealisasi sebesar 100%.
- Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal pada tahun 2023 terealisasi 117,65%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 75%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan sebesar 56,87%.

Sasaran 2 :***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan***

- Untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan pada akhir periode Renstra/RPJMD (tahun 2023) ditetapkan target sebesar 89,85. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat terealisasi sebesar 89,94. dengan capaian kinerjanya tercapai sebesar 100,10%, dengan kategori *Baik*. Sehingga tingkat kemajuan untuk nilai IKM pada periode akhir Renstra/RPJMD tahun 2023 sebesar 0,10%.
- Sedangkan untuk indikator sasaran Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan pada akhir periode Renstra/RPJMD (tahun 2023) ditetapkan target sebesar 4,15. Dan terealisasi sebesar 4,43 dengan capaian kinerja sebesar 106,75% dengan kategori *Sangat Baik*. Sehingga tingkat kemajuan untuk nilai IPP pada periode akhir Renstra/RPJMD tahun 2023 sebesar 6,75%.

Program :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan indikator Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan pada tahun 2023 terealisasi 92,32%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 82%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan sebesar 12,59%.
- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan pada tahun 2023 terealisasi 23,71%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 23%. Sehingga

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan sebesar 3,09%.

Sasaran 3 :***Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah***

- Pada tahun 2023 untuk sasaran *Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah* dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 81,38 Target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 81. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dengan tingkat kemajuan sebesar 0,47%.

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan indikator Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur pada tahun 2023 terealisasi 100%, dan dengan target akhir periode RPJMD /Renstra tahun 2018-2023 sebesar 100%. Sehingga capaian kinerja ini sudah terpenuhi di tahun 2023 dan terealisasi sebesar 100%.

3.1.4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Berikut realisasi kinerja DPMPSTP Kabupaten Jombang Tahun 2022 dibandingkan dengan Realisasi kinerja di level provinsi, ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Realisasi Kinerja di Level Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Provinsi tahun 2023	Realisasi Nasional tahun 2023	Keterangan
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi daerah (PMA dan PMDN)	1.715.913.003.483	145,1 T	1.418,9 T	Sumber data Realisasi Invesatsi Provinsi Jawa Timur dan BKPM

Tabel 3.1.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023
dengan Realisasi Kinerja di Level Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Kabupaten tahun 2023	Realisasi Provinsi tahun 2023	Realisasi Nasional tahun 2023	Keterangan
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,94	88,38	86,25		Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,43	3,39	4,36		Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	81,38	72,70	83,86	63,26	Sumber data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat pencapaian indikator kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Timur, kontribusi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Meningkatnya Investasi Daerah

- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai realisasi investasi tahun 2023 sebesar Rp.1.715.913.003.483,- yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 295.058.878.540,- dan PMDN sebesar Rp.1.420.854.124.943,- untuk Kabupaten Jombang, sedangkan untuk tingkat Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 145,1 Trilyun. Bila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang berkontribusi sebesar 1,18%. Untuk realisasi tingkat Nasional/BKPM RI sebesar Rp. 1.418,9 Trilyun. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Nasional (BKPM/Kementrian Investasi RI), maka kontribusi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sebesar 0,12%. Diharapkan di tahun mendatang kontribusi nilai realisasi investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat meningkat.

Sasaran 2 :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan***

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang terealisasi sebesar 89,94. Berdasarkan data di atas bila dibandingkan dengan realisasi IKM Kabupaten Jombang dengan nilai 88,38, maka nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi 1,56 point. Sedangkan bila dibandingkan dengan nilai IKM Provinsi Jawa Timur dengan nilai 86,25 maka nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi 3,69 point.
- Untuk nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP terealisasi dengan nilai 4,43. Bila dibandingkan dengan Nilai IPP Kabupaten Jombang dengan 3,39, maka nilai IPP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi sebesar 1,04 point, sedangkan bila dibandingkan dengan nilai IPP Provinsi Jawa Timur maka nilai IPP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi sebesar 0,07 point.

Sasaran 3 :***Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah***

- Berdasarkan pada data di atas Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang terealisasi sebesar 81,38. Bila dibandingkan dengan realisasi nilai AKIP Kabupaten Jombang sebesar 72,70 maka nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi sebesar 8,69 point. Sedangkan bila dibandingkan dengan nilai AKIP Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 83,86, maka nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih rendah sebesar 2,47 point. Dan nilai rata-rata AKIP Kabupaten/Kota secara Nasional sebesar 63,26 maka nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang lebih tinggi sebesar 18,13 point.

3.1.5. Analisis atas Realisasi Kinerja

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan yang dihadapi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Penyebab Keberhasilan:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Adanya komitmen dari semua aparatur, pejabat struktural dan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
- Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kewajiban Penyampaian LKPM oleh pelaku usaha.
- Berlakunya Peraturan Bupati Jombang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Berusaha melalui aplikasi perizinan secara online (OSS RBA dan Si Rindu Nona)
- Sudah diberlakukannya TTE (tanda tangan elektronik) rekomendasi dan penerbitan izin Non berusaha melalui SI Rindu Nona sehingga pemohon izin tidak perlu datang ke kantor
- Adanya sarana konsultasi, informasi dan pengaduan melalui surat langsung ke Perangkat Daerah, email, WA dan Kotak Pengaduan.
- Adanya aplikasi GIS Potensi yang merupakan Sistem informasi geografi yang memuat potensi investasi yang ada di Kabupaten Jombang
- Pelaksanaan Business Gethering dan Pameran Investasi

b. Faktor Peningkatan kinerja:

- Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan LKPM (Klik Join/ Klinik Jombang Investasi).
- Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur, OPD Teknis dan Praktisi akademisi
- Pelaksanaan Perilaku Santri (Pendampingan izin diluar kantor sehari jadi tanpa antri) yang dilaksanakan di kecamatan/kantor desa.
- Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA)
- Evaluasi pelayanan perizinan secara berkala untuk peningkatan dan optimalisasi pelayanan perizinan

c. Penyebab Kegagalan:

- Masih terdapat pelaku usaha yang masih belum memahami tata cara penyampaian LKPM melalui OSS.
- Admin LKPM dari pelaku usaha/perusahaan yang sering berganti personil tanpa dibekali informasi tentang pelaporan LKPM oleh admin sebelumnya.
- Beragam permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memproses perizinan berusaha di OSS.
- Pelaku usaha khususnya skala UMK yang sudah memiliki NIB tapi belum melakukan migrasi/update data usaha. .
- Pada saat kunjungan identifikasi penyelesaian permasalahan, pelaku usaha belum mengetahui update regulasi terbaru mengenai perizinan berusaha OSS berbasis risiko.
- Informasi potensi dan peluang investasi belum disusun secara komprehensif. Calon investor belum dapat mengakses informasi secara mudah, menarik dan komprehensif terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Jombang terutama tentang sektor usaha yang potensial dan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya. Investor masih harus mencari informasi dari berbagai sumber/instansi mengenai sektor usaha apa yang menguntungkan untuk dijalankan di Kabupaten Jombang.
- Tingkat pelaporan LKPM oleh pelaku usaha belum optimal karena masih terdapat pelaku usaha yang masih belum memahami tata cara penyampaian LKPM melalui OSS sehingga data realisasi investasi yang diperoleh belum maksimal meskipun target telah terpenuhi

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut :

1. Sistem online terpusat sehingga jika ada permasalahan/kendala system tidak bisa fast respon,
2. Tidak adanya helpdesk pusat di wilayah Kabupaten/Kota sehingga jika ada masalah harus melaporkan ke pusat hingga membutuhkan waktu yang lama
3. Perizinan belum terintegrasi satu pintu masih melalui banyak mekanisme atau alur yang harus dilalui,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

4. Tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang rendah terkait layanan pengaduan DPMPTSP Kabupaten Jombang,
5. Kewenangan Dpmptsp yang selalu berubah secara dinamis tanpa pemberitahuan dari kementerian terkait sehingga dokumen standar pelayanan perizinan ikut berubah,
6. Rendahnya tingkat pengetahuan perusahaan tentang kewajiban pelaporan LKPM,
7. Masih adanya pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal,
8. Kendala teknis terkait dengan instansi lain,
9. Antusiasme pelaku usaha yang rendah untuk mengikuti bimtek,
10. Masih adanya pelaku usaha yang tidak kooperatif terhadap kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Solusi dari permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi baik dengan cara menghubungi, melalui surat dan datang langsung dengan pusat secara kontinuitas secara berkelanjutan,
- b. Mendorong Pemerintah Pusat untuk membuat helpdesk di daerah agar supaya jika ada kendala bisa cepat terselesaikan,
- c. Di daerah perizinan melalui banyak pintu karena sesuai tupoksi harus melalui dinas yang sesuai kewenangannya, akan tetapi dari situ banyak proses yang dilaluinya melalui kelengkapan persyaratan hingga cek/survey ke lapangan yang tentunya memerlukan waktu. Dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dilakukannya koordinasi secara berkelanjutan dan mendorong OPD Teknis untuk melakukan monev dengan mengundang OPD yang terkait,
- d. Sosialisasi layanan pengaduan lewat media sosial, banner dll,
- e. Melakukan monev setahun sekali dan memperbaharui dokumen standar pelayanan sesuai kewenangan yang berlaku,
- f. Meningkatkan intensitas pelaksanaan bimtek dan sosialisasi LKPM,
- g. Melakukan komunikasi lebih intensif kepada perusahaan,
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait,
- i. Melaksanakan bimtek dengan format acara yang lebih menarik,
- j. Melakukan komunikasi lebih intensif kepada perusahaan,
- k. Melaksanakan bimtek dengan format acara yang lebih menarik.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pencapaian target yaitu:

- a. Meningkatkan kegiatan promosi/sosialisasi mengenai Potensi daerah di Kabupaten Jombang
- b. Pendampingan permasalahan perusahaan dan bimtek penyusunan LKPM
- c. Meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Perizinan
- d. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan perizinan.
- e. Peningkatan pelayanan perizinan melalui IT secara online (kemudahan Pelayanan Perizinan)
- f. Penanganan Pengaduan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun media lainnya.
- g. Penyempurnaan Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan
- h. Penerapan SMM ISO 9001 : 2008
- i. Implementasi SI RINDU NONA dapat meningkatkan target indikator perizinan masuk dan terbit khususnya perizinan non berusaha
- j. Sudah diterapkannya pelayanan perizinan non berusaha secara online, melalui aplikasi Sirindunona, dimana pemohon dapat mengajukan izin bidang kesehatan, penelitian dan reklame dari rumah tanpa harus datang ke kantor Integrasi dengan Bakesbangpol, Dinas Kesehatan terkait rekom dan integrasi dengan Bapenda terkait reklame.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Jombang Tahun 2023. Total Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2022 setelah P APBD sebesar Rp. 7.526.234.788 dan dapat terealisasi sebesar Rp 6.942.629.095,- atau 92,25%.

Alokasi anggaran setiap sasaran kinerja (strategis) dan Program pada tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.1
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi daerah	1.400 (dalam Milyar Rp)	1.743.423.642	122,57%	1.769.301.550	1.743.423.642	98,54%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 kebijakan	100%	245.882.500	244.966.649	99,63%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindakanjuz Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	1.065.879.550	1.065.001.864	99,92%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	117,65%	156,86 %	457.539.500	433.455.129	94,74%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	89,85	89,94	100,10 %	664.872.150	652.890.980	98,20%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,15	4,43	106,75 %			
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82%	92,32%	112,58%	326.253.150	324.834.063	99,57%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	23%	23,71%	103,09 %	338.619.000	328.056.917	96,88%
Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81)	81,38	100,47 %	7.368.065.621	6.637.869.013	90,09%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	7.368.065.621	6.637.869.013	90,09%
TOTAL				110,24%	9.802.239.321	9.034.183.635	92,16%

Berdasarkan tabel 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran diatas, maka :

*Sasaran 1 :**Meningkatnya Investasi Daerah*

- Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Investasi Daerah dengan target kinerja nilai investasi daerah sebesar Rp. 1.400.000.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.715.913.003.483,- atau tercapai sebesar 122,57%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.769.301.550,- dan terealisasi Rp. 1.743.423.642,- atau dengan capaian anggaran sebesar 98,54%.

Program :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan sebanyak 1 kebijakan, terealisasi 1 Kebijakan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 245.882.500,- dan terealisasi Rp. 244.966.649,- atau dengan capaian anggaran sebesar 99,63%.
- Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal sebesar 100% belum ada realisasi sehingga tercapai sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.065.879.550,- dan terealisasi Rp. 1.065.001.864,- atau dengan capaian anggaran sebesar 99,92%.
- Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan target kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal sebesar 75%, karena Terdapat 100 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023 maka terealisasi sebesar 118% sehingga capaian kinerja 157,33%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 457.539.500 dan terealisasi Rp. 433.455.129,- atau dengan capaian anggaran sebesar 94,74%.

Sasaran 2 :***Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan***

- Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan target kinerja nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 89,85 dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan 4,15 dapat terealisasi 89,94 dan 4,43 atau dengan capaian sebesar 100,10%% dan 106,75%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 664.872.150,- dan terealisasi sebesar Rp 652.890.980,- atau sebesar 98,20%%.

Program :

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan sebesar 82%, dapat terealisasi 92,32% karena Dari total izin terbit sejumlah 23.399 izin ,yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 21.601 izin sehingga capaian kinerja sebesar 112,59%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 326.253.150,- dan terealisasi Rp. 324.834.063,- atau dengan capaian anggaran sebesar 99,57%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan 23% belum terealisasi sehingga tercapai sebesar 23,71% sehingga capaian kinerja sebesar 103,09%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.619.000,- dan terealisasi Rp. 328.056.917,- atau dengan capaian anggaran sebesar 96,88%.

Sasaran 3 :***Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah***

- Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah sebesar 81 terealisasi 81,38 (A) atau dengan capaian sebesar 100,47%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.368.065.621,- dan terealisasi sebesar Rp 6.637.869.013,- atau sebesar 90,09%.

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan target kinerja Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur 100% dapat terealisasi 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.368.065.621,- dan terealisasi Rp. 6.637.869.013,- atau dengan capaian anggaran sebesar 90,09%.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 110,24% dengan realisasi anggaran sebesar 92,16%. Sehingga efisiensi terhadap anggaran sebesar 18,08%.

3.2.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Dinas Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

3.2.2.1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Anggaran dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya keuangan yang digunakan. Dengan membandingkan antara prosentase

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

capaian kinerja pada Tahun 2023 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tersebut sudah mencapai efisiensi dalam penggunaan. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut terdapat semua program sudah mencapai efisiensi , bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2023 selain beberapa program telah mencapai efisiensi melampaui target beberapa telah mencapai efisiensi walaupun tidak mengalami penambahan yang signifikan. Berikut tabel pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya Keuangan/anggaran :

Tabel 3.2.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan/ Anggaran

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya investasi daerah	Nilai Investasi daerah	122,57%	98,54%	9,29%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim PM Yang Dihasilkan	100%	99,63%	0,37%
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	99,92%	0,08%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	156,86%	94,74%	62,12%
Meningkatnya Kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan	100,10%	98,20%	1,90%
	Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	106,75%		
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	112,58%	99,57%	13,01%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi yang puas dengan pelayanan perizinan	103,09%	96,88%	6,21%
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100,47%	90,09%	10,38%

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	90,09%	9,91%
Total/ Rata-Rata Capaian		110,24%	92,16%	18,08

Berdasarkan tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diatas, maka :

Sasaran 1 :***Meningkatnya Investasi Daerah***

- Sasaran kinerja Meningkatnya investasi Daerah dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 107,83% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 98,54%%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 9,29%

Program :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 99,63%%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 0,37%
- Program Promosi Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 99,92%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 0,08%
- Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 156,86% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 94,74%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 62,12%.

Sasaran 2 :***Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan***

- Sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan target kinerja nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100,10% dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 106,75% prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 98,20%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 1,90%

Program :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Program Pelayanan Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 112,58% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 99,57%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 13,01%
- Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 103,09% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 96,88%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 6,21%

Sasaran 3 :***Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah***

- Sasaran kinerja Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100,47% prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 90,09%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 10,38%

Program :

- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan dengan nilai prosentase capaian kinerja sebesar 100% dan prosentase penyerapan anggaran pendukung sasaran tersebut sebesar 90,09%. Sehingga dapat diketahui tingkat efisiensinya sebesar 9,91%.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rata-rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 110,24% dengan realisasi anggaran sebesar 92,16%. Sehingga efisiensi terhadap anggaran sebesar 18,08%.

3.2.2.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan menggunakan perbandingan kinerja yang dihasilkan terhadap sumber daya Manusia yang tersedia.

Berikut tabel Kebutuhan Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**Tabel 3.2.3****PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN**

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan	Proyeksi										
				Jumlah yang akan Pensiun					Pegawai yang Dibutuhkan					
1	2	3	4	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2026
	Jumlah Seluruhnya	37	59	2	1	1	1	2	23	1	1	1	2	
	DPM-PTSP													
	KEPALA DINAS	1	1											
	SEKRETARIS DINAS	1	1											
	<i>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</i>	1	1											
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1											
	Pengadministrasi Umum	1	1											
	Pengadministrasi Persuratan	1	1	1					1					
	Analisis Jabatan	0	1						1					
	Pengelola Surat	0	1						1					
	Pengelola Kepegawaian	0	1						1					
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	0	1						1					
	Pengelola Dokumen Perizinan	0	1						1					
	Pengadministrasi Perizinan	0	1						1					
	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	0	1						1					
	<i>Sub Bagian Keuangan dan Aset</i>	1	1											
	Bendahara	2	2											
	Pengolah Data Pengelolaan Keuangan	1	1											
	Pengelola Data aplikasi & Pengelolaan Data Sistem Keu.	1	1											
	Pengolah Data laporan Pertanggungjawaban Bendahara	0	1											
	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	1											
	<i>Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi</i>	1	1											
	Pengelola Program dan Kegiatan	0	1						1					
	Penyusun Program Anggaran dan Laporan	1	1											
	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal	1	1					1						1
	<i>Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</i>	1	1											
	Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	0	1						1					
	Pengolah Data Kebijakan Investasi	1	1											
	<i>Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal</i>	1	1											
	Analisis Tata Pameran	0	1						1					
	Penyusun Rencana Promosi	1	1											
	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	1	1											
	<i>Seksi Pelayanan Perizinan Berusaha</i>	1	1											
	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan	0	1						1					
	Analisis Pengusahaan dan Pelayanan	0	1						1					
	Pengelola Dokumen Perizinan	1	1											
	<i>Seksi Pelayanan Perizinan Non Berusaha</i>	1	1											
	Pengelola Layanan Operasional	0	1						1					
	Analisis Dokumen Perizinan	1	1											
	Pengadministrasi Perizinan	1	4						3					
	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	1	1			1					1			
	<i>Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</i>	1	1											
	Analisis Kerjasama dan Permodalan	0	1						1					
	Pengelola Data Administrasi & Verifikasi	2	2	1					1					
	<i>Seksi Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan</i>	1	1				1					1		
	Analisis Pengaduan Masyarakat	0	1						1					
	Pengelola Data Laporan & Pengaduan	1	1											
	Pengelola Pengaduan Publik	0	1						1					
	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi	1	1											
	<i>Seksi Sistem Informasi</i>	1	1											
	Analisis Sistem Informasi	0	1						1					
	Pengelola Database	1	1											
	Pranata Kearsipan	1	1		1					1				
	<i>Seksi Kebijakan dan Pelaporan Layanan</i>	1	1											
	Penyusun Laporan Kebijakan	0	1						1					
	Pengelola Data Rekonsiliasi	1	1					1						1

Dengan membandingkan antara persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai berdasarkan ABK. Ketersediaan pegawai/jumlah PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2023 sebanyak 31 PNS. Sedangkan Kebutuhan pegawai berdasarkan ABK sebanyak 59 pegawai, sehingga dapat diketahui terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 pegawai atau terakomodir sekitar 52,54%. Dengan terakomodirnya ketersediaan pegawai sekitar 52,54% sehingga dalam melaksanakan tugas perangkat daerah dapat dikatakan kurang ideal terkait ketersediaan SDM nya bila di lihat dengan capaian kinerja sebesar 110,24%.

Bila dibandingkan dengan total keseluruhan pegawai (PNS sebanyak 31 orang, Non PNS sebanyak 13 orang dan Tenaga Pendamping sebanyak 1 orang) sebanyak 45 pegawai, maka penggunaan SDM dapat terakomodir sebesar 76,27%. Dengan adanya pegawai non PNS dan tenaga pendamping sehingga bisa mengcover kebutuhan pegawai sebesar 23,73%. Dengan capaian kinerja sebesar 110,24% dengan ketersediaan SDM sebesar 76,27% terdapat efisiensi 33,97%.

3.2.2.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Penggunaan Sumber Daya Sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah merupakan pendukung dalam pencapaian kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut rencana kebutuhan barang milik daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang pada tahun 2023 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.4
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	HASIL REKON	RKBM 2022				JUMLAH	RKBM 2023		
			PENGADAAN	PENGHAPUSAN	PEMINDAH TANGANGAN	PEMANFAATAN		PEMELIHARAAN	STANDAR KEBUTUHAN	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3+4-5-6-7	9	10	11
1	A.C. Split	21		6			15	21	21	6
2	Alat Kantor Lainnya	3					3	3	3	0
3	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2					2	2	2	0
4	Alat Pemadam/Portable	5					5	5	5	0
5	Alat Pemotong Kertas	1					1	1	1	0
6	Alat Penghancur Kertas	2					2	2	2	0
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2		1			1	2	2	1
8	Amplifier	1					1	1	1	0
9	Audio Tape Reel Recorder	1					1	1	1	0
10	Bangku Tunggu	1					1	1	1	0
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2					2	2	2	0
12	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1					1	1	1	0
13	Brandkas	1					1	1	1	0
14	Buku Umum Lain-lain	6					6	6	6	0
15	Camera Electronic	7					7	7	7	0
16	Compact Disc Player	1					1	1	1	0
17	Dispenser	1					1	1	1	0
18	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	0		1			-1	0	0	1

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19	Exhaust Fan	3				3	3	3	0
20	External	1				1	1	1	0
21	Facsimile	1				1	1	1	0
22	Filing Cabinet Besi	26	1			25	26	26	1
23	Filing Cabinet Kayu	1				1	1	1	0
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1				1	1	1	0
25	Gedung Garasi/Pool Permanen	1				1	1	1	0
26	Gordyn/Kray	1	1			0	1	1	1
27	Handy Cam	2				2	2	2	0
28	Handy Talky (HT)	6				6	6	6	0
29	Hard Disk	1				1	1	1	0
30	Hub	1				1	1	1	0
31	ILS. Calibration RX.	2				2	2	2	0
32	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Seda	1				1	1	1	0
33	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	1				1	1	1	0
34	Kaca Hias	1				1	1	1	0
35	Kipas Angin	0	2			-2	0	2	0
36	Kitchen Set	0	1			-1	0	0	1
37	Kompor Gas (Alat Dapur)	1				1	1	1	0
38	Kursi Besi/Metal	22				22	22	22	0
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon I	12	11			1	12	12	11
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2				2	2	2	0
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4				4	4	4	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3	3			0	3	3	3
43	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	3			0	3	3	3
44	Kursi Putar	8	3			5	8	8	3
45	Kursi Rapat	72				72	72	72	0
46	Kursi Tamu	15				15	15	15	0
47	Lap Top	12				12	12	12	0
48	Layar Film/Projector	5				5	5	5	0
49	Lemari Besi/Metal	2				2	2	2	0
50	Lemari Es	1				1	1	1	0
51	Lemari Kaca	5	1			4	5	5	1
52	Lemari Kayu	14				14	14	14	0
53	Lukisan Cat Air	2				2	2	2	0
54	Majalah	0	1			-1	0	0	1
55	Meja 1/2 Biro	31				31	31	31	0
56	Meja Bundar	0	1			-1	0	0	1
57	Meja Kerja Kayu	14				14	14	14	0
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1				1	1	1	0
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3				3	3	3	0
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	6			-5	1	1	6
61	Meja Rapat	15				15	15	24	9
62	Meja Resepsionis	1				1	1	1	0
63	Meja Telepon	1				1	1	1	0
64	Mesin Absensi	1				1	1	1	0
65	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1				1	1	1	0
66	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1				1	1	1	0
67	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1				1	1	1	0
68	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2				2	2	2	0
69	Mesin Pres	1				1	1	1	0
70	Meubeleur lainnya	1				1	1	1	0
71	Microphone/Wireless MIC	1				1	1	1	0
72	Monitor	1				1	1	1	0
73	Network Interface External	5				5	5	5	0
74	Note Book	14	5			9	14	14	5
75	P.C Unit	37	15			22	37	43	21
76	Papan Nama Instansi	1				1	1	1	0
77	Papan Visual/Papan Nama	2				2	2	2	0
78	Peralatan Komputer lainnya	1				1	1	1	0
79	Peralatan Minikomputer lainnya	1				1	1	1	0
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	10				10	10	10	0
81	Perforator Besar	2				2	2	2	0
82	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya (dst)	0	1			-1	0	0	1
83	Pick Up	1				1	1	1	0
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	26			24	50	50	26
85	Rak Besi	22				22	22	22	0
86	Rak Kayu	6				6	6	6	0
87	Rice Cooker (Alat Dapur)	0	1			-1	0	1	0
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16				16	16	16	2
89	Sepeda Motor	17	6			11	17	21	5
90	Server	2				2	2	2	0
91	Sice	1				1	1	1	0
92	Sketsel	2				2	2	2	0

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

93	Sofa	4	3	1	4	4	3
94	Sound System	5		5	5	5	0
95	Station Wagon	4	2	2	4	4	1
96	Stationary Generating Set	1		1	1	1	0
97	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1		1	1	1	0
98	Tabung Gas	1		1	1	1	0
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1		1	1	1	0
100	Tangga Aluminium	1		1	1	1	0
101	Telephone (PABX)	1	1	0	1	1	1
102	Telephone Hybrid	2		2	2	2	0
103	Televisi	7	2	5	7	9	4
104	Tempat Tidur Kayu	1		1	1	1	0
105	Transportable Generating Set	0	1	-1	0	0	1
106	Unit Power Supply	1	5	-4	1	1	5
107	White Board	2		2	2	2	0
107	Video Conference Unit	0		0	0	1	1
108	Alat Jaringan Komputer	0		0	0	7	7

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi tersebut berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Pendampingan pengajuan izin berusaha
- Pelayanan izin non berusaha
- Pemenuhan komitmen perizinan berusaha
- Pelaksanaan bulaga
- Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Pemeliharaan dan pengembangan Sistem Informasi Pelayanan PM dan Perizinan
- Penyusunan laporan perizinan dan penanaman modal
- Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Perizinan (SOP,SPP,SPM,IKM dan ISO)
- Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal
- Pendampingan Perusahaan terkait penyusunan laporan LKPM
- Bimtek LKPM
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal
- Bimtek / Sosialisasi Kemudahan Berusaha
- Temu Usaha (Bisnis Gathering)
- Promosi Potensi Investasi Daerah
- Penyusunan Dokumen RUPM dan dokumen Peta Potensi dan peluang investasi

Upaya perbaikan yang nyata dalam pencapaian dalam pencapaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- Untuk peningkatan nilai invesatsi dengan optimalisasi pelaksanaan Pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha terkait permasalahan pelaporan LKPM dengan inovasi Klik Join/ Klinik Jombang Investasi
- Untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan LKPM dilaksanakan Pembinaan dan bimbingan teknis pelaporan LKPM dengan narasumber dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, OPD Teknis dan Praktisi akademisi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Untuk memfasilitasi kesulitan pelaku usaha mikro dalam mendaftarkan NIBnya dilaksanakan inovasi pelayanan perizinan berusaha dan non berusaha dengan cara jemput bola (Perilaku Santri /Pendampingan izin diluar kantor sehari jadi tanpa antri) yang dilaksanakan di kecamatan/kantor desa.
 - Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko (OSS RBA)
 - Untuk mempermudah dalam perizinan Non berusaha telah diberlakukannya TTE (tanda tangan elektronik) rekomendasi dan penerbitan izin Non berusaha melalui SI Rindu Nona
 - Sebagai sarana informasi potensi yang ada di kabupaten jombang telah tersedianya aplikasi GIS Potensi investasi
 - Optimalisasi Pelaksanaan Business Gethering
 - Pelaksanaan Pameran promosi Investasi
-

BAB 4

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Jombang yaitu : “*Bersama Mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing*” sangatlah ditentukan oleh adanya komitmen pimpinan dan dukungan semua pihak (stakeholders) , dalam penerapan proses perizinan sesuai Standart Pelayanan Publik.
2. Pada tahun 2023 untuk sasaran Meningkatnya Daya Tarik Investasi dengan indikator kinerja Nilai Investasi Tahun n ditargetkan sebesar Rp 1,4 T dan dapat terealisasi sebesar Rp 1.715.913.003.483,-. Apabila capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang capaian kinerjanya sebesar 90,75% maka ada peningkatan sebesar 5,05%, dengan kenaikan investasi sebesar Rp. 82.501.389.852,-. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2021, perkembangan realisasi nilai investasi untuk tahun 2022 naik sebesar 27,42%, dengan kenaikan investasi sebesar Rp. 351.550.305.612,-. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk Nilai Investasi Daerah (PMA dan PMDN) mengalami fluktuatif dikarenakan kondisi perekonomian pada umumnya.
3. Untuk tingkat Provinsi Jawa Timur realisasi investasi sebesar Rp. 145,1 Trilyun. Bila dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang berkontribusi sebesar 1,18%. Untuk realisasi tingkat Nasional/BKPM RI sebesar Rp. 1.418,9 Trilyun. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi Nasional (BKPM/Kementrian Investasi RI), maka kontribusi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang sebesar 0,12%. Diharapkan di tahun mendatang kontribusi nilai realiasi investasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jombang terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat meningkat.

4. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perizinan pada tahun 2023 ditetapkan target sebesar 89,85. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini dapat terealisasi sebesar 89,94 yang diperoleh dari 893 responden tahun 2023, diantaranya terdiri dari 577 Fasilitas Perizinan Berusaha, 245 Fasilitas Perizinan Non Berusaha dan 71 Pelayanan Kesekretariatan. Sehingga untuk capaian kinerjanya Sasaran tercapai sebesar 100,10 %, dengan kategori *Baik*. Untuk tahun 2022 nilai SKM ditetapkan target sebesar 87,75. dapat terealisasi sebesar 85,11. Yang diperoleh dari jumlah responden sebanyak 397 responden/pemohon yang sudah terlayani. Sehingga untuk capaian sasaran kinerjanya tercapai sebesar 96,99 %, dengan kategori *Baik*. Sedangkan di tahun 2021 target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 86,15 indeks. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2021 sebesar 88,14 indeks yang diperoleh dari survey kepuasan masyarakat (SKM) dari 363 responden / pemohon yang sudah terlayani. Sehingga untuk capaian kinerja sasaran tercapai sebesar 102,31 %, dengan kategori *Baik*. Dapat disimpulkan bahwa untuk nilai realisasi IKM pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun tahun 2022 sebesar 85,11 dibandingkan dengan tahun 2021 dengan nilai sebesar 88,14 mengalami penurunan sebesar 3,03 point. Sedangkan pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 89,94 mengalami kenaikan sebesar 4,83 point atau sebesar 5,67% bila dibandingkan tahun 2022.
5. Untuk Nilai IPP ditetapkan tahun 2023 ditargetkan sebesar 4,15 dan terealisasi sebesar 4,43 sehingga capaian kinerja sasaran untuk IPP tahun 2023 sebesar 106,75% dengan kategori *Baik*. Tahun 2022 ditetapkan target sebesar 4,10. Nilai IPP ini dan terealisasi sebesar 4,61 dengan kategori *Pelayanan Prima*. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 112,44 %, dengan kategori *Istimewa*. Pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 4,07. Nilai IPP ini dapat terealisasi sebesar 3,58 dengan kategori *Pelayanan Prima*. Sehingga untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 87,96 %, dengan kategori *Baik*. Dapat disimpulkan bahwa untuk nilai realisasi IPP pada tahun 2022 sebesar 4,61 dibanding dengan tahun 2021 sebesar 3,58 mengalami kenaikan sebesar 1,03 point atau sebesar 28,77%. Sedangkan ditahun 2023 nilai IPP sebesar 4,43 mengalami penurunan sebesar 0,18 point atau sebesar 3,90% dari tahun 2022, namun masih dalam kategori *Pelayanan Prima* dan capaian kinerja sasaran kategori *Baik*. Hal ini dikarenakan Komitmen tinggi aparatur pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk selalu melakukan perbaikan dalam meningkatkan pelayanan prima/ service excellence kepada masyarakat, dukungan

Program, Kegiatan dan sub Kegiatan serta sarana/prasarana dan peralatan yang memadai.

6. Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator nilai evaluasi AKIP pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 80,15 dan terealisasi sebesar 80,19 dengan kategori *(A) Memuaskan*, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,05% atau kategori Baik. Di tahun 2022 dan 2023 ditetapkan target sebesar 81. Realisasi di tahun 2022 nilai evaluasi AKIP sebesar 80,39 dengan kategori *(A) Memuaskan*, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,25%, atau kategori Baik. Dan realisasi tahun 2023 sebesar 81,38 dengan kategori *(A) Memuaskan*, dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,47% atau kategori Baik. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui nilai evaluasi AKIP di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari tahun 2021. Sedangkan di tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,23% dari tahun 2022. Dari pencapaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan komitmen seluruh pegawai dalam penerapan SAKIP di perangkat daerah dan selalu melakukan perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, dan pelaporan serta evaluasi untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
7. Dengan membandingkan antara prosentase capaian kinerja pada Tahun 2022 dengan prosentase penyerapan anggaran Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut sudah mencapai efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah mencapai efisiensi, bahkan melampaui target yang ditetapkan tahun 2023 selain beberapa program telah mencapai efisiensi melampaui target beberapa telah mencapai efisiensi walaupun tidak mengalami penambahan yang signifikan.
8. Realisasi anggaran tahun 2023 dari target Rp. 9.802.239.321,- terealisasi sebesar Rp. 9.034.183.635,- dengan prosentase penyerapan sebesar 92,16%. Sedangkan anggaran Belanja tahun 2022 dari target sebesar Rp. 7.526.234.788,- terealisasi sebesar Rp. 6.942.360.265,- dengan prosentase penyerapan sebesar 92,24% sehingga di tahun 2023 realisasi anggaran apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 30,13% .

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berikutnya yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Diperlukannya penyampaian fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar SKPD teknis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
2. Mengoptimalkan peran Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu satu Pintu sehingga tepat sasaran, yaitu:
 - a. Pengelolaan web perijinan, pelayanan OSS dan SiRinduNona
 - b. Memperbanyak Kajian mengenai potensi investasi dan Peta potensi guna menunjang investasi di daerah,
 - c. Meningkatkan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga diharapkan akan tertib untuk melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM
 - d. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan bimtek LKPM
 - e. Melakukan maintenance dan upgrade system untuk menunjang pelayanan perizinan dan non perizinan
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun SKPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perizinan menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
4. Pengembangan system teknologi informasi pelayanan perijinan secara komprehensif dan berkelanjutan (data base).
5. Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan. Sehingga memberikan kenyamanan kepada pemohon/pengguna jasa secara bertahap, maupun sarana penunjang lainnya.
6. Perlunya penambahan kuantitas dan kualitas SDM (dengan mengikuti Bimtek untuk pelayanan perizinan OSS sesuai tupoksi dalam pemberian proses pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha/investor.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran serta kritik

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan LKjIP ini di masa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang selama Tahun 2022 dan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini, kami ucapkan banyak terima kasih.

Jombang, Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG**



Dra. WOR WINDARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19731204 199202 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 800/61/415.01/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. WOR WINDARI, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MUNDJIDAH WAHAB**
Jabatan : **Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 24 Januari 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



Hj. MUNDJIDAH WAHAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun <i>n</i>	1.400.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Layanan Perizinan	89,85
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,15
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81 (A)

NO .	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 kebijakan	340.882.500
2	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program promosi Penanaman modal	Persentase Tindakanjuz Promosi Penanaman Modal	100%	892.379.550
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	422.539.500
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82 %	301.253.400
5.	Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23 %	303.619.000

NO .	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	7.302.605.409
TOTAL ANGGARAN					9.563.279.359

Jombang, 24 Januari 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



Hj. MUNDJIDAH WAHAB



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 800/780/415.01/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. WOR WINDARI, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**
Jabatan : **Pj. Bupati Jombang**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 13 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun <i>n</i>	1.400.000.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas pelayanan perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang Layanan Perizinan	89,85
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,15
3.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81 (A)

NO .	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 kebijakan	245.882.500
2	Meningkatnya Jumlah Calon Investor PMA /PMDN yang berinvestasi	Program promosi Penanaman modal	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	1.065.879.550
3.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	457.539.500
4.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	82 %	326.253.150
5.	Meningkatnya Pengguna Sistem Informasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23 %	338.619.000

6.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	7.368.065.621
TOTAL ANGGARAN					9.802.239.321

Jombang, 13 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 197312041992022001

PIHAK KEDUA
Pj. Bupati Jombang
Ditandatangani secara elektronik



SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si

2 NIP : 19731204 199202 2 001

3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda / IV c

4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

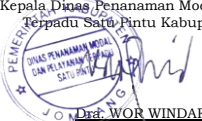
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun n	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman	3 kegiatan
			3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan
			4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan
			2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan
			3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan
			2 Mengevaluasi capaian kinerja	3 kegiatan	2 Mengevaluasi capaian kinerja	3 kegiatan	2 Mengevaluasi capaian kinerja	3 kegiatan	2 Mengevaluasi capaian kinerja	3 kegiatan
			3 Menetapkan Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan
			4 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan						
			5 Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	1 kegiatan						
4	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	1 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	1 Melakukan review atas rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	1 kegiatan	1 melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindak lanjut penyusunan rumusan kebijakan pengembangan	3 kegiatan
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait tindak lanjut rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	2	
5	Meningkatnya jumlah calon investor PMA / PMDN yang berinvestasi	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan
			3 Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan
6	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	1 Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1 Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1 Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	1 Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET
			2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan
			3 Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan
7	Meningkatnya pengguna sistem informasi dalam kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan
8	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan
			3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	3 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan
9	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan
			2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	2 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP.19720710 199803 1 010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang


Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL 1 TAHUN 2023**

1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si
2 NIP : 19731204 199202 2 001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/ IV c
4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun n	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Pada TB I realisasi investasi sebesar Rp 127.841.572.461,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepedminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepemintan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 20 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB I dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM, Laporan pendampingan pada perusahaan
			4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Pada TB I realisasi investasi sebesar Rp 126.457.021.280,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	-	-	-
			2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Penyusunan dilakukan di TB 2, 3, 4	Melakukan koordinasi dengan unit / bidang / OPD untuk penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari izin yang masuk 7.074 izin (6858 izin berusaha + 216 izin non berusaha) , terbit 6966 izin (6858 izin berusaha + 108 izin non berusaha) Dari jumlah izin yang terbit pada TB I sejumlah 6966 izin, 6868 izin terbit sesuai standart pelayanan	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Jumlah pengguna 2.760, web perizinan = 1.710 pengguna dan dari sirindunona = 1.050 Terpublikasikannya konten dan data perizinan secara up to date dan berkelanjutan	-	sirindunona dan web perizinan
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	diperlukan pendampingan terkait penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP	Melakukan koordinasi dan sosialisasi internal terkait persiapan penilaian SAKIP	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3 Menetapkan Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
			4 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			5 Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
4	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dibutuhkan potensi/profil/project investasi/IPRO yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Mempersiapkan potensi/profil/project investasi yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
5	Meningkatnya jumlah calon investor PMA / PMDN yang berinvestasi	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepeminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepemintan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
6	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari izin yang masuk 7.074 izin (6858 izin berusaha + 216 izin non berusaha) , terbit 6966 izin (6858 izin berusaha + 108 izin non berusaha) Dari jumlah izin yang terbit pada TB I sejumlah 6966 izin, 6868 izin terbit sesuai standart pelayanan	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
7	Meningkatnya pengguna sistem informasi dalam kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Pengukuran dilakukan di TB IV, Jumlah pengguna 2.760, web perizinan = 1.710 pengguna dan dari sirindunona = 1.050	-	sirindunona dan web perizinan
			2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
8	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 20 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB I dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM
			2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
9	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
RATA-RATA CAPAIAN										

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, April 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang



Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAN 2 TAHUN 2023

1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si
2 NIP : 19731204 199202 2 001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/ IV c
4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun n	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Nilai realisasi investasi TB II berdasarkan dari LKPM sebesar Rp. 378.202.129.966,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepedminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepemintan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 20 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB II dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM, Laporan pendampingan pada perusahaan
			4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Nilai realisasi investasi TB II berdasarkan dari LKPM sebesar Rp. 378.201.220.000,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	-	-	-
			2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Penyusunan dilakukan di TB 2, 3, 4	Melakukan koordinasi dengan unit / bidang / OPD untuk penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari total izin terbit sejumlah 10.701 izin , yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 10.442 izin	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Jumlah pengguna dari web perizinan = 2.634 pengguna dan dari sirindunona = 1.627 pengguna Terpublikasikannya konten dan data perizinan secara up to date dan berkelanjutan	-	sirindunona dan web perizinan
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	diperlukan pendampingan terkait penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP	Melakukan koordinasi dan sosialisasi internal terkait persiapan penilaian SAKIP	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3 Menetapkan Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
			4 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			5 Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
4	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihilkan	1 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dibutuhkan potensi/profil/project investasi/IPRO yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Mempersiapkan potensi/profil/project investasi yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
5	Meningkatnya jumlah calon investor PMA / PMDN yang berinvestasi	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepeminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepemintan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
6	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari total izin terbit sejumlah 10.701 izin , yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 10.442 izin	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
7	Meningkatnya pengguna sistem informasi dalam kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Pengukuran dilakukan di TB IV, Jumlah pengguna dari web perizinan = 2.634 pengguna dan dari sirindunona = 1.627 pengguna	-	sirindunona dan web perizinan
			2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
8	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 20 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB II dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM
			2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
9	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
RATA-RATA CAPAIAN										

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, Juli 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jombang



Dra. WIR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAL 3 TAHUN 2023

- 1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si
- 2 NIP : 19731204 199202 2 001
- 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/ IV c
- 4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
- 5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

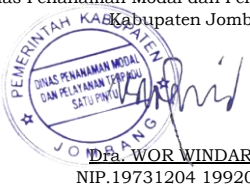
NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun n	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Nilai realisasi investasi TB III berdasarkan dari LKPM sebesar Rp. 896.090.280.000,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepeminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepemintan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 20 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB III dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM, Laporan pendampingan pada perusahaan
			4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Nilai realisasi investasi TB III berdasarkan dari LKPM sebesar Rp. 896.090.280.000,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	-	-	-
			2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Penyusunan dilakukan di TB 2, 3, 4	Melakukan koordinasi dengan unit / bidang / OPD untuk penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari total izin terbit sejumlah 10.701 izin , yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 10.442 izin	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Jumlah pengguna dari web perizinan = 2.634 pengguna dan dari sirindunona = 1.627 pengguna Terpublikasikannya konten dan data perizinan secara up to date dan berkelanjutan	-	sirindunona dan web perizinan
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	diperlukan pendampingan terkait penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP	Melakukan koordinasi dan sosialisasi internal terkait persiapan penilaian SAKIP	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3 Menetapkan Rencana Kerja OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
			4 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			5 Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
4	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dibutuhkan potensi/profil/project investasi/IPRO yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Mempersiapkan potensi/profil/project investasi yang siap dikerjasamakan dari Kab	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
			2	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%		Jombang	
5	Meningkatnya jumlah calon investor PMA / PMDN yang berinvestasi	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	1	Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepeminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepemintan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			2	Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
6	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	1	Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari total izin terbit sejumlah 10.701 izin , yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 10.442 izin	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2	Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
7	Meningkatnya pengguna sistem informasi dalam kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Pengukuran dilakukan di TB IV, Jumlah pengguna dari web perizinan = 2.634 pengguna dan dari sirindunona = 1.627 pengguna	-	sirindunona dan web perizinan
			2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
8	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 20 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB III dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM
			2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
9	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
RATA-RATA CAPAIAN										

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, Oktober 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jombang


Dra. WOR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
TRIBUNAN 4 TAHUN 2023**

1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si
2 NIP : 19731204 199202 2 001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/ IV c
4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Nilai Investasi Tahun n	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi realisasi investasi daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Nilai realisasi investasi TB IV berdasarkan dari LKPM sebesar Rp. 107.510.397.962,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi dan Peningkatan Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepedminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepedminatan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			3 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 40 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM, Laporan pendampingan pada perusahaan
			4 Melakukan koordinasi dengan bidang terkait realisasi investasi	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Nilai realisasi investasi TB IV berdasarkan dari LKPM sebesar Rp. 107.510.397.962,- dari target Tahun 2023 sebesar Rp 1,4 T	Meningkatkan monitoring terhadap realisasi investasi daerah	Rapat koordinasi internal dengan bidang
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	1 Melakukan pembinaan peningkatan kinerja unit pelayanan publik	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	-	-	-
			2 Melakukan kordinasi dan evaluasi terkait Penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Penyusunan dilakukan di TB 2, 3, 4	Melakukan koordinasi dengan unit / bidang / OPD untuk penyusunan Kebijakan teknis bidang Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			3 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari total izin terbit sejumlah 23.339 izin , yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 21.601 izin	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Jumlah pengguna dari web perizinan = 6.873 pengguna dan dari sirindunona = 6.855 pengguna Terpublikasikannya konten dan data perizinan secara up to date dan berkelanjutan	-	sirindunona dan web perizinan
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	1 Melakukan pembinaan implementasi SAKIP OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	diperlukan pendampingan terkait penyusunan kelengkapan dokumen SAKIP	Melakukan koordinasi dan sosialisasi internal terkait persiapan penilaian SAKIP	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Mengevaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3 Pemantauan dan Evaluasi capaian kinerja OPD	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
4	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 melakukan monitoring dan evaluasi terkait tindak lanjut penyusunan rumusan kebijakan pengembangan iklim PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dibutuhkan potensi/profil/project investasi/IPRO yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Mempersiapkan potensi/profil/project investasi yang siap dikerjasamakan dari Kab Jombang	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
5	Meningkatnya jumlah calon investor PMA / PMDN yang berinvestasi	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	1 Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Promosi Penanaman Modal	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Agar form kepedminatan segera disiapkan untuk di isi pada kegiatan bisnis gathering yang mana nantinya form kepedminatan tersebut akan digunakan untuk menindaklanjuti promosi PM	Melakukan koordinasi dengan bidang untuk persiapan kegiatan bisnis gathering	Rapat koordinasi internal dengan bidang PM
			2 Melakukan koordinasi dan evaluasi terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3 Melakukan pembinaan terkait tindak lanjut promosi PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
6	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	1 Melakukan evaluasi terkait kinerja pelayanan perizinan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Dari total izin terbit sejumlah 23.339 izin , yang terbit sesuai standart pelayanan adalah 21.601 izin	Meningkatkan monitoring terhadap pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perizinan	Rapat koordinasi internal dengan bidang
			2 Melakukan verifikasi dan validasi terkait pelayanan perizinan OSS dan Sirindunona	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
			3	Melakukan koordinasi terkait penyusunan SOP, SPP dan ISO dan SKM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
7	Meningkatnya pengguna sistem informasi dalam kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Pengukuran dilakukan di TB IV, Jumlah pengguna dari web perizinan = 6.873 pengguna dan dari sirindunona = 6.855 pengguna	-	sirindunona dan web perizinan
			2	Melakukan koordinasi terkait pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
8	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Terdapat 40 perusahaan yang telah melaporkan LKPM pada TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-	Laporan LKPM
			2	Melakukan koordinasi terkait peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan PM	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			3	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha dan bimtek LKPM	1 kegiatan	1 kegiatan	100%			
9	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
			2	Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3 kegiatan	3 kegiatan	100%			
RATA-RATA CAPAIAN										

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jombang


Dra. WIR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JOMBANG**

1 NAMA : Dra. WOR WINDARI, M.Si
2 NIP : 19731204 199202 2 001
3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda/ IV c
4 JABATAN : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang
5 UNIT KERJA : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBULAN 3	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
1	Meningkatkan Daya Tarik Investasi	Nilai Investasi Tahun n	1.400.000.000.000	1.381.802.808.355	98,70%						Nilai realisasi investasi TB IV berdasarkan dari LKPM sebesar Rp.107.510.397.962,- . Nilai tersebut adalah nilai sementara karena menunggu rilis resmi dari BKPM pada minggu ke 4 Bulan Januari 2024	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perizinan	89,85	89,94	100,10%						Pelaksanaan SKM tahun 2023, diperoleh sebanyak 893 responden, diantaranya terdiri dari 577 Fasilitasi Perizinan Berusaha, 245 Fasilitasi Perizinan Non Berusaha dan 71 Pelayanan Kesekretariatan. Dengan nilai rata-rata 89,94 di Tahun 2023	
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) di bidang PM dan Perizinan	4,15	4,43	106,75%						Hasil evaluasi IPP dengan 37 indikator, pada tahun 2023 diperoleh 4,43	
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	A (81)□	81,38	100,47%						Hasil nilai evaluasi AKIP oleh tim evaluator adalah 81,38 dengan komponen Perencanaan Kinerja (26,41), Pengukuran Kinerja (27,92), Pelaporan Kinerja (8,18) dan Evaluasi Kinerja (18,87)	
4	Tersedianya Kebijakan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Rumusan Kebijakan Pengembangan Iklim Pm Yang Dihasilkan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100%	1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	245.882.500	244.966.649	99,63%	Tersusun IPRO 3 Sektor (Ternak Sapi di Desa Jenis Gelaran Bareng)	
5	Meningkatnya jumlah calon investor PMA / PMDN yang berinvestasi	Persentase Tindaklanjut Promosi Penanaman Modal	100%	100%	100%	2	Program Promosi Penanaman Modal	1.065.879.550	1.065.001.864	99,92%	Telah dilaksanakan Pameran Apkasi, GPLJ, Bisnis Gathering, Pameran Pelayanan Publik. Serta telah dilakukan tindak lanjut atas calon investor yang mengisi form kepeminatan pada 20 calon investor	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL 3	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN					PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI		
6	Meningkatnya mutu pelayanan perizinan	Persentase Layanan Perizinan Yang Sesuai Dengan Standart Pelayanan	82%	92,32%	112,58%	3	Program Pelayanan Penanaman Modal	326.253.150	324.834.063	99,57%	Dari jumlah izin yang terbit sejumlah 21.601 izin, 23.399 izin terbit sesuai standart pelayanan	
7	Meningkatnya pengguna sistem informasi dalam kegiatan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Pengguna Sistem Informasi Yang Puas Dengan Pelayanan Perizinan	23%	23,71%	103,09%	4	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	338.619.000	328.056.917	96,88%	Pada tahun 2023 jumlah pengguna sistem informasi yang puas sebesar 6.855 pengguna. Pada tahun 2022 jumlah pengguna yang puas adalah 5.541 pengguna, sehingga terdapat peningkatan sebesar 23,71 % di Tahun 2023	
8	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	75%	117,65%	156,86%	5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	457.539.500	433.455.129	94,74%	Terdapat 100 perusahaan yang telah melaporkan LKPM sampai dengan TB IV dari total target 85 perusahaan di Tahun 2023	-
9	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100,00%	100,00%	6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	7.368.065.621	6.637.869.013	90,09%	-	-
								9.802.239.321	9.034.183.635	92,16%		

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH., M.Si
NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Jombang



Dfa. WOR WINDARI, M.Si
NIP.19731204 199202 2 001

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

[illegible]

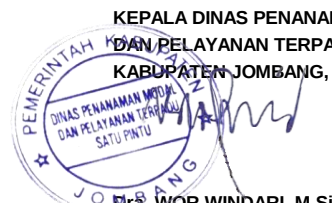
[illegible]

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	URAIAN	HASIL REKON	RKBMD 2022				JUMLAH	RKBMD 2023		
			PENGAD AAN	PENGHA PUSAN	PEMINDA HTANGAN AN	PEMANF AATAN		PEMELIHARA AN	STANDAR KEBUTUHA N	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7	8 =3+4-5-6-7	9	10	11
1	A.C. Split	21		6			15	21	21	6
2	Alat Kantor Lainnya	3					3	3	3	0
3	Alat Khusus Keamanan Lainnya	2					2	2	2	0
4	Alat Pemadam/Portable	5					5	5	5	0
5	Alat Pemotong Kertas	1					1	1	1	0
6	Alat Penghancur Kertas	2					2	2	2	0
7	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2		1			1	2	2	1
8	Amplifier	1					1	1	1	0
9	Audio Tape Reel Recorder	1					1	1	1	0
10	Bangku Tunggu	1					1	1	1	0
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2					2	2	2	0
12	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain	1					1	1	1	0
13	Brandkas	1					1	1	1	0
14	Buku Umum Lain-lain	6					6	6	6	0
15	Camera Electronic	7					7	7	7	0
16	Compact Disc Player	1					1	1	1	0
17	Dispenser	1					1	1	1	0
18	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	0		1			-1	0	0	1
19	Exhause Fan	3					3	3	3	0
20	External	1					1	1	1	0
21	Facsimile	1					1	1	1	0
22	Filing Cabinet Besi	26		1			25	26	26	1
23	Filing Cabinet Kayu	1					1	1	1	0
24	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1					1	1	1	0
25	Gedung Garasi/Pool Permanen	1					1	1	1	0
26	Gordyin/Kray	1		1			0	1	1	1
27	Handy Cam	2					2	2	2	0
28	Handy Talky (HT)	6					6	6	6	0
29	Hard Disk	1					1	1	1	0
30	Hub	1					1	1	1	0
31	ILS. Calibration RX.	2					2	2	2	0
32	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Se	1					1	1	1	0
33	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KV	1					1	1	1	0
34	Kaca Hias	1					1	1	1	0
35	Kipas Angin	0		2			-2	0	2	0
36	Kitchen Set	0		1			-1	0	0	1
37	Kompore Gas (Alat Dapur)	1					1	1	1	0
38	Kursi Besi/Metal	22					22	22	22	0
39	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	12		11			1	12	12	11
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2					2	2	2	0
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4					4	4	4	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	3		3			0	3	3	3
43	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3		3			0	3	3	3
44	Kursi Putar	8		3			5	8	8	3
45	Kursi Rapat	72					72	72	72	0
46	Kursi Tamu	15					15	15	15	0
47	Lap Top	12					12	12	12	0
48	Layar Film/Projector	5					5	5	5	0
49	Lemari Besi/Metal	2					2	2	2	0
50	Lemari Es	1					1	1	1	0
51	Lemari Kaca	5		1			4	5	5	1
52	Lemari Kayu	14					14	14	14	0
53	Lukisan Cat Air	2					2	2	2	0
54	Majalah	0		1			-1	0	0	1
55	Meja 1/2 Biro	31					31	31	31	0
56	Meja Bundar	0		1			-1	0	0	1
57	Meja Kerja Kayu	14					14	14	14	0
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1					1	1	1	0
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3					3	3	3	0
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1		6			-5	1	1	6
61	Meja Rapat	15					15	15	24	9
62	Meja Resepsionis	1					1	1	1	0
63	Meja Telepon	1					1	1	1	0

NO	URAIAN	HASIL REKON	RKBMD 2022				JUMLAH 8 = 3+4-5-6-7	RKBMD 2023		
			PENGAD AAN	PENGHA PUSAN	PEMINDA HTANGAN AN	PEMANF AATAN		PEMELIHARA AN	STANDAR KEBUTUHA N	PENGADAAN
1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
64	Mesin Absensi	1					1	1	1	0
65	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1					1	1	1	0
66	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1					1	1	1	0
67	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1					1	1	1	0
68	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2					2	2	2	0
69	Mesin Pres	1					1	1	1	0
70	Meubeleur lainnya	1					1	1	1	0
71	Microphone/Wireless MIC	1					1	1	1	0
72	Monitor	1					1	1	1	0
73	Netware Interface External	5					5	5	5	0
74	Note Book	14		5			9	14	14	5
75	P.C Unit	37		15			22	37	43	21
76	Papan Nama Instansi	1					1	1	1	0
77	Papan Visual/Papan Nama	2					2	2	2	0
78	Peralatan Komputer lainnya	1					1	1	1	0
79	Peralatan Minikomputer lainnya	1					1	1	1	0
80	Peralatan Personal Komputer lainnya	10					10	10	10	0
81	Perforator Besar	2					2	2	2	0
82	Perkakas bengkel konstruksi logam lainnya	0		1			-1	0	0	1
83	Pick Up	1					1	1	1	0
84	Printer (Peralatan Personal Komputer)	50		26			24	50	50	26
85	Rak Besi	22					22	22	22	0
86	Rak Kayu	6					6	6	6	0
87	Rice Cooker (Alat Dapur)	0		1			-1	0	1	0
88	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	16					16	16	16	2
89	Sepeda Motor	17		6			11	17	21	5
90	Server	2					2	2	2	0
91	Sice	1					1	1	1	0
92	Sketsel	2					2	2	2	0
93	Sofa	4		3			1	4	4	3
94	Sound System	5					5	5	5	0
95	Station Wagon	4		2			2	4	4	1
96	Stationary Generating Set	1					1	1	1	0
97	Storage Modul Disk (Peralatan Mainframe)	1					1	1	1	0
98	Tabung Gas	1					1	1	1	0
99	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1					1	1	1	0
100	Tangga Aluminium	1					1	1	1	0
101	Telephone (PABX)	1		1			0	1	1	1
102	Telephone Hybrid	2					2	2	2	0
103	Televisi	7		2			5	7	9	4
104	Tempat Tidur Kayu	1					1	1	1	0
105	Transportable Generating Set	0		1			-1	0	0	1
106	Unit Power Supply	1		5			-4	1	1	5
107	White Board	2					2	2	2	0
107	Video Confrence Unit	0					0	0	1	1
108	Alat Jaringan Komputer	0					0	0	7	7

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JOMBANG,



Dra. WOR WINDARI, M.Si.
NIP. 19731204 199202 2 001



Jl. Presiden KH. Abdurahman Wahid No. 151 Jombang



Telp. 0321. 873333 Fax. 0321. 851733



dpmptsp.jombangkab.go.id

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

